

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**DAMPAK KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT OLEH PEMERINTAH  
TERHADAP MASYARAKAT PETANI SAWIT DI KECAMATAN  
KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Islam Riau



**Handi Eko Prabowo**  
**NPM : 157310081**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Handi Eko Prabowo  
NPM : 157310081  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh  
Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit  
Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

  
Budi Muliando, S.IP, M.Si

Pekanbaru, 2 April 2020

Pembimbing  
  
Dr. Zainal, S.Sos, M.Si

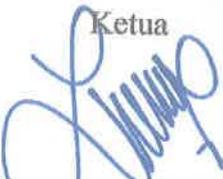
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Handi Eko Prabowo  
NPM : 157310081  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh  
Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit  
Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode Penelitian Ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 2 April 2020

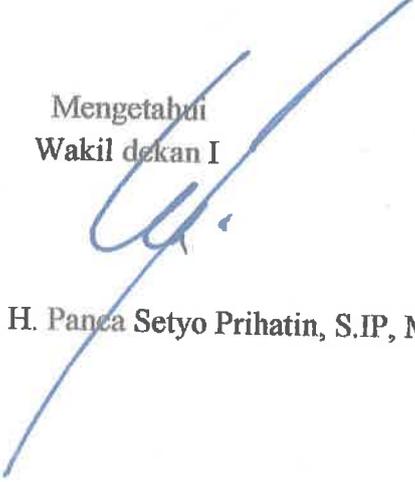
Ketua  
  
Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Sekretaris

  
Syaprianto, S.Sos., M.ip

Mengetahui  
Wakil dekan I

Anggota

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

  
Budi Mulianto, S.IP, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

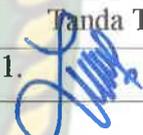
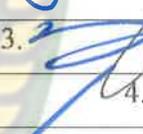
---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 072/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Maret 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Handi Eko Prabowo  
NPM : 157310081  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Dampak Kebijakan PERemajaan Sawit oleh PEMerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " 82. " ; Huruf : " A- "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Zainal, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.Ip	Sekretaris	2. 
3.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Maret 2020  
An: Dekan,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

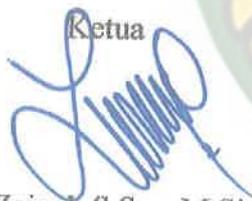
**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Handi Eko Prabowo  
NPM : 157310081  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh  
Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit  
Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 2 April 2020

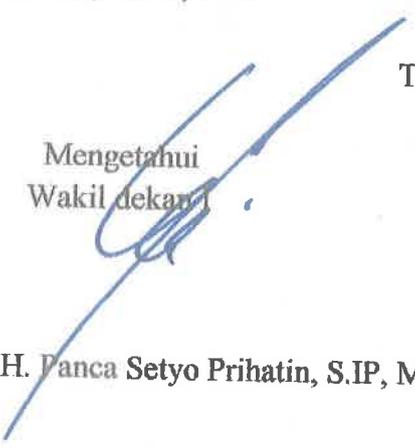
Sekretaris

Ketua  


Dr. Zainal, S.Sos, M.Si

  
Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui

Mengetahui  
Wakil dekan I  


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

  
Budi Muliarto, S.IP, M.Si

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si yang menjabat sebagai dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
2. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin S.IP, M.Si yang menjabat sebagai wakil dekan bidang 1 akademik
3. Ketua program studi ilmu pemerintahan Bapak Budi Mulianto, S.IP, M.Si yang telah memberikan arahan dan nasehat nya kepada penulis
4. Bapak Dr. Zainal. S.Sos. M.Si, yang bertindak sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama perkuliahan.
  6. Teristimewa untuk Ayah ku Budi Sunyoto, ibu tercinta Siti Malifah, adik tercinta Bella Nurulita atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya serta air mata dan doa untuk ananda.
  7. Juga tidak lupa buat teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu dan semoga kita semua sukses, amiiin.
- Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta nusa dan bangsa, amiiin.

Pekanbaru, 28 Januari 2020  
Penulis

Handi Eko Prabowo

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Pikir .....	36
D. Konsep Operasional.....	37
E. Operasional Variabel .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Dan Key Informan .....	42

D. Teknik Penarikan Informan .....	42
E. Jenis Dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	46
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Siak .....	47
B. Sejarah Kecamatan Koto Gasib .....	54
C. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Koto Gasib .....	56
D. Kedudukan Serta Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak .....	58
E. Peremajaan Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.....	59
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil penelitian .....	61
B. Pembahasan Penelitian Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak .	64
C. Hambatan Dampak Kebijakan Peremajaan Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.....	84
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I : Petani Yang Telah Melakukan Peremajaan Kelapa Sawit Di Kecamatan Di Koto Gasib .....	6
II.1. : Perbandingan Penelitian.....	33
II.2. : Operasional Variabel Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.	39
III.1. : Populasi Penelitian.....	43
III.2 : Jadwal Dan Waktu Penelitian .....	46
IV.1. : Luas Wilayah Kecamatan Dan Kepenghuluan/Kelurahan Di Kabupaten Siak ....	52
IV.2. : jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak.....	53
V.1. : Identitas Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	62
V.2. : Jumlah Informan Berdasarkan Umur Tentang Dampak Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak .....	63
V.3. : Identitas Informan Berdasarkan Jabatan.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II. : Kerangka pemikiran dampak kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit di kecamatan koto gasib kabupaten siak.....	36
IV.1. : Struktur Organisasi Kantor Camat Koto Gasib .....	56



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handi Eko Prabowo  
NPM : 157310081  
Program studi : Ilmu Pemerintahan  
Skripsi : Dampak Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas Dan Universitas serta hukum negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 April 2020

Pelaku pernyataan



Handi Eko Prabowo

**DAMPAK KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT OLEH PEMERINTAH  
TERHADAP MASYARAKAT PETANI SAWIT DI KECAMATAN  
KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

**Abstrak**

Handi Eko Prabowo

Indonesia merupakan salah satu negara agraris, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat besar, baik itu dari sumber daya alam darat maupun laut. Sumber daya alam darat sangat membantu perekonomian masyarakat Indonesia salah satunya yaitu pertanian. Pertanian Indonesia memiliki beberapa komoditi unggulan, salah satunya kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman keras sebagai salah satu sumber penghasil minyak nabati yang bermanfaat luas dan memiliki keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya. Pada tahun 2015 pemerintah melakukan peremajaan seluruh Indonesia, hal ini dilakukan karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia. Secara ekonomi, kebijakan peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, fakta ini merupakan titik berat masyarakat dalam melakukan peremajaan, masalah yang paling berat adalah biaya yang akan dikeluarkan masyarakat petani sawit selama masa tunggu peremajaan. Adapun Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang terjadi pada kebijakan peremajaan sawit, pada penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif dengan indikator yang telah ditentukan, dan cara pengumpulan dan perhitungan data penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar mendapatkan informasi maka peneliti mengambil informan dan *key informan*. *informan* penelitian ini adalah masyarakat petani Kelapa Sawit, sedangkan *key informan* penelitian ini adalah tenaga kontrak pendamping pembangunan perkebunan (TKP3). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi *literature*. Setelah melakukan penelitian ini diketahui bahwa Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak masih ada kendala dan masih belum berjalan maksimal dan diketahui bahwa kebijakan peremajaan sawit mempunyai dampak sementara terhadap masyarakat petani sawit karena dengan adanya peremajaan sawit, masyarakat petani sawit mengalami kehilangan penghasilan utama mereka dan masyarakat petani sawit harus memiliki biaya lebih apabila jika masih ada tanggungan anak yang bersekolah ataupun kuliah, banyaknya biaya yang dibutuhkan masyarakat selama masa tunggu peremajaan sehingga banyak masyarakat petani sawit yang lebih memilih mempertahankan kebun sawitnya dan belum melakukan peremajaan.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Peremajaan sawit, Masyarakat Petani Sawit

**THE IMPACT OF THE GOVERNMENT'S PALM OIL REJUVENATION  
POLICY ON THE COMMUNITY OF PALM OIL FARMERS IN  
KOTO GASIB DISTRICT SIAK REGENCY**

**Abstract**

Handi Eko Prabowo

Indonesia is an agricultural country, Indonesia's natural resources are very large, both from land and sea natural resources. Terrestrial natural resources greatly help the economy of Indonesian people, one of which is agriculture. Indonesian agriculture has several superior commodities, one of which is oil palm. Palm oil is a tree plant as one of the sources of vegetable oil that is widely beneficial and has advantages compared to other vegetable oils. In 2015 the government rejuvenated the whole of Indonesia, this was done because oil palm is a strategic commodity for Indonesia. Economically, the oil palm rejuvenation policy that is implemented requires no small amount of money, this fact is the focus of the community in conducting rejuvenation, the most serious problem is the cost that will be incurred by the community of oil palm farmers during the waiting period of rejuvenation. The research was conducted in the District of Koto Gasib, Siak Regency. The purpose of this research is to find out and analyze the impacts that occur on the oil palm rejuvenation policy, in this study used a descriptive research type with predetermined indicators, and how to collect and calculate research data with a qualitative approach. In order to get information, the researchers took informants and key informants. The informant of this research is the Palm Oil farming community, while the key informant of this research is the contractor of plantation development assistance (TKP3). Data collection techniques in this study used interview, observation, documentation and literature study techniques. After conducting this research, it is known that the Government's Palm Rejuvenation Policy Towards the Palm Oil Farmers Community in Koto Gasib District Siak Regency, there are still constraints and are still not running optimally and it is known that the oil rejuvenation policy has a temporary impact on the oil palm farming community due to the rejuvenation of oil palm, the farming community oil palm experiences loss of their main income and the community of oil palm farmers must have more costs if there are still dependents of children going to school or college, the amount of costs needed by the community during the waiting period of rejuvenation so that many palm oil communities prefer to maintain their oil palm plantations and have not rejuvenated.

**Keywords:** Impact of Policies, Rejuvenation of Palm Oil, Palm Oil Farmers Community

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara agraris, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat besar, baik itu dari sumber daya alam darat maupun laut. Sumber daya alam darat sangat membantu perekonomian masyarakat Indonesia salah satunya yaitu pertanian. Mayoritas masyarakat memang hidup dari hasil pertanian. Pertanian Indonesia memiliki beberapa komoditi unggulan baik pada tanaman pangan maupun tanaman nonpangan. Tanaman pangan yang menjadi komoditi unggulan Indonesia antara lain kelapa sawit, kelapa, kakao, karet, teh, sedangkan untuk tanaman nonpangan diantaranya kapas, tembakau, cengkeh dan lainnya.

Kelapa sawit adalah tanaman keras sebagai salah satu sumber penghasil minyak nabati yang bermanfaat luas dan memiliki keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya. Industri kelapa sawit terdiri dari beberapa segmen industri yaitu budidaya perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan perdagangan. Umumnya industri yang banyak diusahakan di Indonesia adalah segmen budidaya perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau, karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit. Untuk masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat

terhadap usaha tani kelapa sawit. Ini terbukti semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara swadaya (BPS 2019).

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama tujuh tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 2,49% sampai 13,85% pertahun (BPS 2019). Pada tahun 2014 lahan perkebunan kelapa Sawit Indonesia tercatat 10,75 juta hektar, meningkat menjadi 14,32 juta hektar pada tahun 2018. Dan Pada tahun 2019 di perkirakan luas areal areal perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat sebesar 2.49% menjadi 14,67 juta hektar jumlah itu terdiri dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat seluas 5.958.502 ha, area perkebunan besar negara (PBN) mencapai 633.924 ha, dan area perkebunan besar swasta (PBS) yang mencapai 8.085.134 ha. (BPS 2019).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kawasan kebun kelapa sawit terbesar di Indonesia mencapai 2,8 juta hektar. Jumlah itu, terdiri dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat seluas 1.577.783 ha, area perkebunan besar negara (PBN) yang mencapai 67.380 ha, dan area perkebunan besar swasta (PBS) yang mencapai 1.161.187 ha (BPS 2019).

Ada beberapa alasan kenapa pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: pertama, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit, kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi. Kedua, kondisi tanah yang memungkinkan untuk di tanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ketiga, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang

strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura. Keempat, Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan. Kelima, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza,2002).

Diversifikasi hasil produksi pertanian melalui pembudidayaan kelapa sawit akan lebih meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta merupakan akselerator bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, seperti peningkatan perekonomian dari hasil perkebunan kelapa sawit, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendidikan, akses transportasi, perbaikan infrastruktur desa, peluang usaha, mobilitas penduduk, peningkatan fasilitas-fasilitas umum dan industri yang berkaitan dengan pengolahan kelapa sawit. Dengan demikian sedikit-demi sedikit usaha tersebut akan meluas dan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah (Syahza dan Johan,2003).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya didaerah pedesaan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.

Pada tahun 2015 pemerintah berencana melakukan peremajaan seluruh Indonesia, hal ini dilakukan karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia. Kelapa Sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita sebab Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Itu artinya Negara Indonesia harus kerja keras untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan, termasuk dalam hal peremajaan. Peremajaan kelapa sawit merupakan proses peremajaan kelapa sawit dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya. Untuk melaksanakan kegiatan peremajaan perlu terlebih dahulu dilaksanakan persiapan antara lain penumbuhan, pemberdayaan kelembagaan pekebun dan perbaikan komponen budidaya tanaman kelapa sawit. Sebelum pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlukan beberapa kegiatan pendukung agar memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun kegiatan tersebut mencakup Pra Peremajaan, Persiapan Administrasi, Persiapan Teknis Lapangan, Persiapan Penumbuhan Kelembagaan dan Persiapan Pendampingan. (SK DIRJENBUN 2017)

Untuk menjamin peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis, dan produktivitas sesuai potensi, perlu dilaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota, dan dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan provinsi. Petani sawit yang melakukan peremajaan menerima dana 25 juta/ha dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan. Dan BPDPKS merupakan badan layanan umum dibawah kementerian keuangan yang bertugas

mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategi Nasional Indonesia.(SK DIRJENBUN 2017)

Di dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan sawit didalam pasal 15 disebutkan bahwa, peremajaan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat di manfaatkan secara optimal. Dan didalam peraturan daerah Provinsi Riau no. 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perkebunan pasal 28 di sebutkan bahwa;

1. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan peremajaan perkebunan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan,
2. Perusahaan perkebunan yang akan melakukan peremajaan kebun baik kebun sendiri maupun kebun masyarakat binaannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b harus melakukan ekspos rencana peremajaan di dinas.
3. Pelaksanaan peremajaan perkebunan agar dilaporkan secara periodik dan teratur setiap 6 bulan sekali ke pemerintah daerah.

Menurut Dinas pertanian Kabupaten Siak kelapa sawit di Kecamatan Koto Gasib telah lama diusahakan dimulai pada tahun 1985. Sehingga usia kelapa sawit sudah memasuki umur 35 tahun. Sesuai dengan daur umur teknis budidaya tanaman kelapa sawit yang harus mulai diremajakan setelah umur 25 tahun ke atas, maka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Koto Gasib telah tiba waktunya dilakukan peremajaan, bahkan sudah melewati batas waktu yang seharusnya, Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, kebun kelapa sawit memiliki luas 10.213 ha, dan di Kecamatan Koto Gasib memiliki jumlah 11 desa dan hanya 3 desa yang memiliki perkebunan kelapa

sawit yang telah memasuki umur 30 tahun keatas, dan adapun luas kebun sawit yang akan diremajakan dan yang telah melakukan peremajaan yaitu:

**Tabel.I. Luas Perkebunan Yang Melakukan Peremajaan Kelapa Sawit Di Kecamatan Di Koto Gasib**

NO	Nama Desa	Luas Perkebunan	Telah Peremajaan
1.	Empang Pandan	900 ha	122,8 ha
2.	Tasik Seminai	430 ha	430 ha
3.	Keranji Guguh	654 ha	654 ha
<b>Jumlah</b>		1.984 ha	1.206,8 ha

**Sumber: Dinas Pertanian 2019**

Tabel di atas menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit yang melakukan peremajaan Di Kecamatan Koto Gasib. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas di kecamatan koto gasib dan merupakan desa dengan perkebunan kelapa sawit tertua di Kabupaten Siak, dengan memiliki perkebunan kelapa sawit yang telah memasuki usia 30 tahun ke atas, sehingga kecamatan Koto Gasib merupakan kecamatan dengan peremajaan pertama di Kabupaten Siak, Peremajaan dilakukan supaya produksi tanaman kelapa sawit meningkat didalam jangka panjang. Selain itu dilakukannya peremajaan adalah untuk mendapatkan komposisi tanaman yang ideal sehingga produksi rata-rata per hektar akan sama dengan produksi rata-rata tanaman yang diusahakan sepanjang siklus hidupnya.

Secara ekonomi, kebijakan peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, fakta ini merupakan titik berat masyarakat dalam melakukan peremajaan, masalah yang paling berat adalah biaya yang akan dikeluarkan masyarakat petani sawit selama masa tunggu peremajaan, tanpa adanya masukan pendapatan dari kebun kelapa sawit seperti sebelumnya, sementara masyarakat harus

tetap membiayai kebutuhan hidupnya, mereka mengalami dimana keadaan ketika mereka harus kehilangan penghasilan utama mereka, selama kebun kelapa sawit diremajakan banyak masyarakat yang bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari pekerjaan lain atau memanfaatkan tabungan mereka selama kebun sawitnya dulu masih menghasilkan, dan masyarakat petani sawit harus memiliki biaya lebih apabila jika masih ada tanggungan anak yang bersekolah atau pun kuliah, sudah tentu pengeluaran tidak cukup hanya untuk makan saja tetapi juga harus memikirkan biaya untuk kuliah dan lain-lain. Banyaknya biaya yang dibutuhkan masyarakat selama masa tunggu peremajaan sehingga jika dikaitkan dengan kemampuan masyarakat dalam menghadapi peremajaan kelapa sawit sangatlah rendah. Kemampuan untuk meremajakan kebun kelapa sawit sangat ditentukan oleh kemampuan modal yang dimiliki oleh petani kelapa sawit dalam menghadapi masa tunggu peremajaan sawit, sehingga menjadi penting untuk diamati terkait dengan dampak dari peremajaan sawit ini.

Ada beberapa fenomena yang didapatkan dari uraian diatas yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dampak kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yaitu :

1. Dari uraian di atas mengenai Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, dari fakta yang ditemukan terdapat masyarakat petani sawit yang mengalami kehilangan penghasilan utama mereka karena adanya peremajaan sawit, sehingga selama kebun sawit diremajakan banyak masyarakat yang bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan

mencari pekerjaan lain atau memanfaatkan tabungan mereka selama kebun sawitnya dulu masih menghasilkan.

2. Masyarakat petani sawit harus memiliki biaya lebih apabila jika masih ada tanggungan anak yang bersekolah ataupun kuliah, sehingga pengeluaran tidak hanya cukup hanya makan saja tetapi juga harus memikirkan biaya kuliah dan lain-lain, banyaknya biaya yang dibutuhkan masyarakat selama masa tunggu peremajaan sehingga banyak masyarakat petani sawit yang lebih memilih mempertahankan kebun sawitnya dan belum melakukan peremajaan.

Berkaitan dengan fenomena dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah dampak kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang terjadi pada kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini juga digunakan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dibidang yang sama dengan yang ini.
2. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam kebijakan peremajaan sawit.
3. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah yang menjalankan kebijakan peremajaan sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Budiardjo (2003: 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan pada konsep dasar Negara tersebut.

Sedangkan menurut Pamuji (2005:22) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.

Menurut Ndraha (2002:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2002:5-6) pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperoleh akan jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ atau yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan.

Kemudian menurut Ndraha (2002:69) istilah *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat
2. Pemerintah adalah sebagai seluruh organ kekuasaan didalam Negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintah diartikan pelaksana tugas seluruh badan, lembaga dan petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Erliana (2005:3) pemikiran dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupannya secara wajar. Dalam perkembangannya selanjutnya aktivitas masyarakat semakin beragam dan meluas, demikian juga pola hubungan dan interaksi yang berkembang, maka berkembang pulalah aktivitas pemerintah menjadi sebagai pemberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hakekat pelayanan kepada masyarakat bermakna menciptakan kondisi yang kondusif sehingga memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dengan demikian secara umum tugas pokok pemerintahan dapat mencakup bidang:

1. Keamanan, negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Ketertiban, dengan cara mencegah terjadinya konflik dan menjamin berlangsungnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai.
3. Keadilan, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai porsi dari profesionalisasi kemampuan dan aktivitasnya. Secara konkrit keadilan terhadap masyarakat dapat melalui keputusan-keputusan, kebijakan yang dikeluarkan maupun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tersebut pemerintah harus mampu berdiri kokoh secara netral dan tidak berpihak pada golongan manapun.
4. Kesejahteraan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pemerintah membantu orang-orang tidak mampu, orang-orang cacat, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para pencari kerja dan gelandangan kepada sektor-sektor informal maupun sektor formal, sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan dan menikmati tingkat kesejahteraan sesuai kemampuan dan profesi yang dimiliki.
5. Ekonomi, dalam bidang ekonomi pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya memajukan perdagangan dalam dan luar negeri, menciptakan lapangan kerja baru, mengendalikan laju inflasi, serta mampu menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.
6. Pekerjaan umum, dalam bidang ini pemerintah memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan terhadap bidang-bidang yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non pemerintah. Kegiatan pekerjaan umum antara lain mencakup penyediaan fasilitas pendidikan pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular serta pembangunan jalan dan jembatan.

7. Pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang ini mencakup pemeliharaan air, tanah, dan hutan. Untuk bidang ini tugas pemerintah mencakup pula memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna pemanfaatan sumber daya alam dengan mengedepankan keseimbangan antara pemakaian dan pengembangan.

## 2. Konsep Kebijakan publik

Sebagai suatu konsep, secara sederhana kita bisa menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya, apabila kita melihat konsep dari kebijakan publik tersebut, kebijakan memiliki makna atau arti yang luas tergantung bagaimana melihat atau mendeskripsikannya, beberapa ahli mendefinisikan bahwa kebijakan publik berupa serangkaian tindakan atau kegiatan, maupun keputusan yang dilakukan pemerintah atau mendeskripsikan dengan cara yang berbeda-beda.

Menurut Dunn (2003: 132) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang di buat oleh badan atau kantor pemerintahan.

Menurut Scoott 1997 (Dalam Moran: 2006) Kebijakan publik adalah instrumen cita-cita tegas, dan studi kebijakan dalam model yang muncul dari riset operasi selama perang dunia kedua, pada awalnya digambarkan sebagai kendaraan ambisi tersebut, jelas

ada semangat modernis tinggi tertentu pada upaya kesombongan teknokratis, dengan semangat misi untuk membuat dunia yang lebih baik, sebuah keyakinan besar akan kemampuan kita untuk mengukur dan memantau dunia tersebut, dan keyakinan yang tak terbatas akan kemampuan kita yang sebenarnya untuk melakukan tugas pengendalian.

Menurut Dror (Dalam Moran 2006:118) dalam membuat kebijakan, merenungkan, merasakan, dan bermimpi tentang masa depan adalah alternatif dan penggerak penting bagi pembuat kebijakan yang mencakup empat unsur utama:

1. Sebagaimana ditunjukkan, pusat beredarnya semua pilihan adalah masa depan alternatif, konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Bertrand De Jouvenel (Jouvenel 1967) dan ia sebut "*futuribles*". Membayangkan dan memikirkan tentang masa depan adalah alternatif ruang-ruang kebijakan utama, pertimbangkan mana yang harus dicegah dan mana yang harus difasilitasi, mengidentifikasi adalah penggerak utama yang akan memajukan pencegahan dan realisasi berbagai masa depan alternatif dan memilih beberapa penggerak yang dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk diintegrasikan kedalam kebijakan besar, termasuk kelembagaan.
2. Yang dibutuhkan tidak hanya pemikiran yang disengaja dan disiplin mengenai masa depan alternatif dan penggeraknya, tetapi melatih seluruh pikiran seseorang. Membayangkan masa depan alternatif, bermimpi tentangnya, dan berspekulasi tentangnya sangat penting untuk menyuntikkan kreativitas yang sangat dibutuhkan dan untuk menjadikan seluruh pikiran penguasa berjalan dalam hal masa depan alternatif.

3. Membayangkan, bermimpi, berspekulasi, menebak dan terakhir merencanakan dan menyusun kebijakan besar menuntut berbagai kerangka agar tidak tersesat dalam labirin masa depan. Bingkai yang paling mendesak adalah pasang surut negara, daerah, komunitas, dan kemanusiaan. Betapapun spekulatifnya sebagian bingkai ini, ia menyediakan dasar bagi pemikiran yang mendalam dan menyeluruh tentang masa depan alternatif.
4. Kebijakan besar yang nyata dan secara langsung membimbing adalah visi realitis dan mimpi buruk. Ini adalah gambar alternatif khusus mengenai masa depan jarak dekat dan menengah untuk diupayakan atau dicegah. Untuk memeriksa realisme dalam menurunkan kebijakan darinya, ia harus dikaitkan dengan dinamika saat ini dengan skenario dan peta lintasan.

Kita sudah mengetahui bersama bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga publik atau seseorang yang memiliki otoritas dalam hal ini secara umum adalah pemerintah. Kebijakan publik tersebut adalah keputusan yang dibuat setelah adanya isu atau permasalahan pada masyarakat dengan isu-isu atau problem tertentu.

Menurut Nugroho dalam *public policy* secara generik terdapat empat bentuk kebijakan publik yaitu

1. Kebijakan Formal

adalah suatu keputusan-keputusan yang disusun secara tertulis dan disahkan agar dapat berlaku sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Perundang-Undangan, merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan negara maupun

masyarakat. Perundang-undangan biasanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal ini perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Seperti yang telah dijelaskan, Indonesia masih menganut sistem kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan dari kebijakan tentang perundang-undangan berupa Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, UU ini mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. TAP MPR
  - c. UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
  - d. peraturan Pemerintah
  - e. Peraturan Presiden
  - f. Peraturan Daerah Provinsi
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota
- b. Hukum, merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan, hukum merupakan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak, dan masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, dan harus mendapatkan sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum tersebut.
  - c. Regulasi, berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis.

## 2. Kebiasaan Umum Lembaga Publik Yang Telah Diterima Bersama

Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, dan memiliki standar operasional prosedur tidak tertulis maupun tertulis, tetapi tidak diformalkan. Ada beberapa konvensi yang ditumbuhkan dari organisasi publik, sebagai contoh pidato presiden tanggal 16 agustus, sedangkan konvensi yang ditumbuhkan dari publik sendiri contohnya yakni memperingati 17 agustus sebagai hari kemerdekaan.

## 3. Pernyataan Pejabat Publik Dalam Forum Publik

Seorang pejabat publik harus selalu mewakili lembaga publik yang dipimpinnya, sehingga setiap pernyataan harus bersifat kebenaran, konsisten dan terencana. Jadi dalam hal ini seorang pejabat publik harus dituntut bijaksana dalam mengemukakan pernyataannya di dalam forum publik, sehingga masyarakat mengetahui maksud dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat publik tersebut.

## 4. Perilaku Pejabat Publik

Yaitu bagaimana seorang pejabat publik bersikap apabila berada di depan publik, karena setiap sikap atau perilaku dari pejabat publik dapat mempengaruhi rakyat. Karena dalam prakteknya setiap perilaku dari pejabat publik akan selalu diingat dan didengarkan oleh rakyat yang dipimpinnya, sehingga pejabat publik harus memiliki sifat dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh masyarakat atau rakyatnya, terutama generasi muda yang mempunyai cita-cita menjadi pejabat publik.

## 3. Konsep Dampak kebijakan

Kebijakan yang diformulasikan atau dibuat untuk kepentingan masyarakat seperti yang diketahui memiliki tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya tujuan yang ingin

dicapai kebijakan, maka setelah dilakukannya implementasi pada akhirnya juga akan memiliki dampak, dampak dari sebuah kebijakan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya, jadi bisa dikatakan bahwa dampak dari suatu kebijakan merupakan hal yang penting dalam kebijakan itu sendiri.

Dampak merupakan suatu pencerminan hasil dari implementasi kebijakan, maksudnya ialah dalam kebijakan publik dampak merupakan suatu kajian untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan publik itu sendiri, terkadang kebijakan dalam implementasinya bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan bisa juga tidak, Jadi dalam hal ini melihat tujuan suatu kebijakan merupakan hal yang harus dilakukan tetapi hasil dari suatu kebijakan tidak bisa diketahui tanpa implementasi, dan jika implementasi dari suatu kebijakan sudah dilaksanakan, dari situ akan menyebabkan dampak pada target kebijakan, dampak tersebut nanti yang akan diselaraskan dengan tujuan kebijakan dan menjadi pertimbangan.

Sehingga kita bisa melihat dan menilai efektif atau tidaknya suatu kebijakan dari kebijakan tersebut. Dye dalam Winarno (2012: 232) mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi dan terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu:

1. Merupakan Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus di batasi, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.

2. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
4. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
5. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa dampak memang merupakan komponen penting dalam menilai suatu kebijakan yang telah diimplementasikan, seperti yang telah dijelaskan dari awal bahwa kadang implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan kadang tidak sesuai apa yang diharapkan atau bisa dikatakan gagal.

Perlu diketahui bahwa dampak kebijakan dibedakan menjadi dua, yakni *Policy Impact* dan *Policy Output*. *Policy impact* adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilakukannya suatu kebijakan, sedangkan *policy output* merupakan apa yang telah dihasilkan proses dalam perumusan kebijakan. Jadi dalam hal ini *policy impact* merupakan hasil atau akibat setelah kebijakan terimplementasi sedangkan *policy output* merupakan hasil dari kebijakan itu sendiri.

#### 4. Konsep Kebutuhan

Menurut Asmadi (2008) setiap makhluk hidup memiliki berupa kebutuhan, tidak terkecuali dengan manusia. Manusia memiliki berbagai banyak kebutuhan, namun pada intinya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama, kebutuhan ini bersifat manusiawi dan syarat untuk kelangsungan hidup manusia, Siapa pun orangnya pasti perlu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2002) mengungkapkan kebutuhan manusia pada zamannya sebagai kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Dan kebutuhan manusia dewasa tetap sama, namun alat untuk memenuhi dan mengejanya sudah berbeda dan berkembang.

Menurut Hidayat (2000) Manusia memiliki kebutuhan yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena terdapat perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebut ikut berbeda, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya.

Menurut Maslow (dalam Asmadi 2008) Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan yaitu, motivasi kekurangan dan motivasi pertumbuhan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Misalnya rasa lapar akan selalu mendorong seseorang untuk makan, dan rasa haus akan mendorong seseorang untuk minum, dan rasa kecemasan akan menjadikan seseorang untuk mencari keamanan dan seterusnya.

Sedangkan motivasi pertumbuhan didasarkan atas kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berkembang hal ini merupakan pembawaan dari setiap manusia.

Menurut Maslow kebutuhan harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting, karena untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat tinggi kepentingannya.

Lima kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, diambil dari Ndraha (2002:42) sebagai berikut :

#### 1. Kebutuhan Fisiologi

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan primer dan harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan bagi setiap manusia. Kebutuhan ini merupakan syarat dasar apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi kebutuhan lainnya.

Apabila kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi, maka seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi dan begitu seterusnya. Dominasi kebutuhan fisiologi ini relatif lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan lain, sehingga dengan demikian dapat muncul kebutuhan-kebutuhan lainnya.

#### 2. Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan

Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan perlindungan diri dari berbagai bahaya yang mengancam keselamatan fisik, keselamatan dan keamanan akan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan, seseorang tidak akan merasa aman apabila ada yang mengancam tubuhnya. Dan ancaman ini bisa bersifat nyata atau hanya imajinasi, seperti misalnya penyakit, nyeri, cemas dan lain sebagainya.

### 3. Kebutuhan Mencintai dan Dicintai

Kebutuhan cinta adalah kebutuhan dasar yang menggambarkan emosi seseorang, kebutuhan ini merupakan suatu dorongan dimana seseorang berkeinginan untuk menjalin hubungan yang bermakna secara efektif atau hubungan emosional dengan orang lain, keinginan ini akan makin menekan seseorang sedemikian rupa, sehingga ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemenuhan dalam kebutuhan akan cinta kasih dan perasaan memiliki.

### 4. Kebutuhan Harga Diri

Menurut Stuart & Sundeen (1998) Harga diri adalah penilaian individu mengenai nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal diri, menurut hierarki kebutuhan dasar manusia, seseorang dapat mencapai kebutuhan harga diri bila kebutuhan terhadap mencintai dan dicintai telah terpenuhi, terpenuhinya kebutuhan harga diri seseorang tampak dari sikap penghargaan diri pada dirinya sendiri.

### 5. Kebutuhan Aktualisasi diri

Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkatan kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow dan Kalish. Oleh karenanya untuk mencapai tingkat kebutuhan aktualisasi diri ini banyak hambatan yang menghalanginya. Secara umum hambatan tersebut terbagi dua yakni internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti ketidaktahuan akan potensi diri serta perasaan ragu dan takut mengungkapkan potensial diri, sehingga potensinya terus terpendam. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar diri seseorang, seperti budaya masyarakat yang tidak mendukung, faktor lingkungan dan faktor keluarga dalam

membentukan aktualisasi diri. Dan berdasarkan teori maslow mengenai aktualisasi diri, terdapat asumsi dasar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki nilai dasar berupa kebaikan, dari sinilah manusia memiliki peluang untuk mengembangkan dirinya.

## 5. Konsep Ekonomi Pemerintahan

Menurut Abdulsyani (2007) kondisi ekonomi merupakan kegiatan masyarakat yang bernilai ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, kondisi ekonomi dalam masyarakat pada umumnya dijadikan sebagai penilaian dalam memberikan status pada setiap anggota masyarakat. Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani "*oikos*" yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan "*nomos*" yaitu peraturan atau aturan. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Kondisi ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendapatannya dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pendapatan seseorang berbeda satu sama lainnya, hal ini karena dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan pendidikan yang dimiliki seseorang tersebut, pendapatan yang diperoleh dari bekerja biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan ada juga yang disimpan atau ditabung.

Dan dalam memenuhi kebutuhan setiap seseorang atau keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung pada kebudayaan yang dimiliki keluarga tersebut. Namun pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama yaitu dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan setiap keluarga atau seseorang memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin makmur dalam hal ekonomi sebagai suatu tujuan hidup dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini ada 4 faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi sehingga menghambat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu.

#### 1. Pendapatan keseluruhan

Pendapatan keseluruhan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang.

Dalam hal kesejahteraan, Abdillah (2015) membedakan tingkat pendapatan ekonomi keluarga menjadi empat golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan ekonomi sangat tinggi, adalah jika dalam keluarga tersebut terkandung adanya unsur keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran lahir dan batin. Rata-rata pendapatan rumah tangga pada golongan ini  $> \text{Rp } 3.000.000$  perbulan
- b. Golongan ekonomi tinggi, adalah jika dalam keluarga tersebut hanya terkandung unsur keselamatan, ketentraman. Rata-rata pendapatan rumah tangga pada golongan ini antara  $\text{Rp } 2.000.000 - \text{Rp } 3.000.000$  perbulan.
- c. Golongan ekonomi sedang, adalah jika dalam keluarga hanya terkandung keselamatan. Rata-rata pendapatannya antara  $\text{Rp } 1.000.000 - \text{Rp } 2.000.000$  perbulan.
- d. Golongan ekonomi rendah, adalah jika dalam keluarga tersebut tidak terkandung unsur keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran lahir dan batin. Maka Rata-rata pendapatan rumah tangga pada golongan ini  $< \text{Rp } 1.000.000$  perbulan.

#### 2. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan juga sebagai bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

### 3. Kesehatan

Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial sejahtera dan bukan hanya ketiadaan penyakit dan kelemahan. Dan Pada tahun 1986 WHO dalam piagam ottawa untuk promosi kesehatan mengatakan, bahwa pengertian kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan hanya kesehatan sebagai konsep positif tetapi juga menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan fisik. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

#### 4. Sandang dan Pangan

Sandang adalah pakaian manusia yang merupakan kebutuhan primer pertama, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga pakaian adalah hal yang paling penting. Sedangkan pangan adalah sumber makanan bagi manusia dan juga merupakan kebutuhan primer.

Pangan meliputi pekerjaan dan hal-hal yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan kebutuhan pangan bagi kehidupan. Manusia hidup dalam masyarakat dan membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

#### 6. Konsep Peremajaan Sawit

Kelapa sawit adalah tanaman keras sebagai salah satu sumber penghasil minyak nabati yang bermanfaat luas dan memiliki keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya.

Sedangkan peremajaan sawit adalah merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya.

peremajaan kelapa Sawit dilaksanakan untuk mengganti tanaman yang telah melewati umur ekonomis 25 tahun dan tanaman yang produktivitasnya telah berkurang. Kegiatan peremajaan ini juga mencakup penanganan resiko kebun seperti yang terkena dampak pengaturan tata ruang wilayah, kawasan hutan dan kesatuan hidrologis gambut.

Untuk melaksanakan kegiatan peremajaan perlu terlebih dahulu dilaksanakan persiapan antara lain penumbuhan, pemberdayaan kelembagaan pekebun dan perbaikan

komponen budidaya tanaman kelapa sawit. Sebelum pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlukan beberapa kegiatan pendukung agar memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun kegiatan tersebut mencakup pra peremajaan, Persiapan Administrasi, Persiapan Teknis Lapangan, Persiapan Penumbuhan Kelembagaan dan Persiapan Pendampingan. Uraian kegiatan persiapan peremajaan dimaksud sebagai berikut:

#### 1. Pra peremajaan Tanaman

Kegiatan pra peremajaan tanaman dilaksanakan paling kurang satu tahun sebelum usulan peremajaan dilakukan dengan tujuan agar pada saat usulan peremajaan kelapa sawit diajukan, berbagai hal yang diperlukan termasuk dokumen pendukung harus dapat dilengkapi.

Kegiatan ini berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit yang menjadi sasaran peremajaan kelapa sawit.

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk usulan peremajaan sebagai berikut :

- a. Daftar nominatif pekebun yang disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota atas nama Bupati/Walikota.
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Kartu Keluarga.
- d. Legalitas lahan.
- e. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), atau bukti proses pengurusan STDB.
- f. Peta Lokasi Kebun yang berkoordinat/polygon hasil Global Positioning System (GPS), drone dan atau alat lainnya.

## 2. Persiapan Administrasi

- a. Pendataan luas areal kebun, meliputi: pendataan luas areal kebun sawit, seperti luas areal tanaman menghasilkan, tanaman belum menghasilkan, tanaman tua dan tanaman rusak di wilayah tersebut.
- b. Identifikasi dan verifikasi petani sawit dilakukan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.
- c. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS).
  - a. RKP3KS di susun oleh kelompok tani/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya
  - b. Penyusunan RKP3KS oleh kelompok tani/gapoktan/kelembagaan pekebun lainnya

## 3. Persiapan Teknis peremajaan

Sistem peremajaan kelapa sawit diutamakan dengan Sistem Penumbangan Serempak karena pengolahan tanah dapat dilakukan lebih intensif dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman, atau sistem peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam peremajaan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Pendataan luasan dan pemetaan blok-blok yang akan di remajakan. Peta blok harus mencakup informasi akses lokasi, luasan blok-blok, kondisi lahan, kerapatan tanaman dan kemungkinan kendala yang akan ditemui dilapangan;
- b. Pengadaan benih unggul bersertifikat disesuaikan dengan rencana waktu penanaman, Penyiapan alat dan bahan, Perencanaan biaya peremajaan.

#### 4. Persiapan Kelembagaan

Kelembagaan petani sawit, baik berupa kelompok tani atau kelembagaan pekebun lainnya perlu dipersiapkan dengan baik agar peremajaan dapat dilaksanakan sesuai target. Untuk mempersiapkan peremajaan, perlu dilaksanakan pelatihan bagi anggota kelompok tani atau kelembagaan pekebun lainnya sejak awal sehingga para peserta memahami tugas dan kewajibannya, baik menyangkut masalah manajemen, kerjasama, maupun teknis peremajaan.

#### 5. Pendampingan

Pendampingan bagi kelompok tani atau kelembagaan pekebun lainnya merupakan kunci keberhasilan kegiatan peremajaan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan sasaran produktivitas dapat dicapai sesuai potensinya. Pendampingan kelompok tani atau kelembagaan pekebun lainnya dilaksanakan sebagai berikut:

##### a. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping merupakan FASDA atau TKP3 atau fasilitator lainnya yang berada di wilayah peremajaan. Tenaga Pendamping bertugas mendampingi kelompok tani atau kelembagaan pekebun lainnya dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi maupun keuangan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan peremajaan sesuai standar teknis, tenaga pendamping perlu mendapat pelatihan teknis, administrasi, dan keuangan. Tenaga Pendamping ditetapkan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.

## b. Struktur Pendampingan

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlukan tenaga pendamping dengan struktur sebagai berikut:

1. Tingkat desa, untuk meningkatkan pengawalan dan pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan perlu didukung tenaga pendamping desa yang berdomisili di desa. Dan untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan petugas tenaga pendamping dapat mendayagunakan petugas dinas sebagai pendamping perekebunan di wilayah sasaran.
2. Tingkat kecamatan, pendamping ditingkat kecamatan adalah TKP3 atau penyuluh atau petugas dinas yang ditunjuk yang bertempat tinggal di wilayah kerja.
3. Tingkat kabupaten/kota, pendamping ditingkat kabupaten/kota adalah seorang petugas dinas kabupaten/kota atau TKP3 yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kabupaten/kota.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menentukan langkah-langka secara sistematis baik dalam teori maupun konsep. Adanya penelitian terdahulu membuat peneliti dapat melihat dari peneliti lain dan belajar dari kekurangan dan mengisi ruang kosong yang belum sempat diisi oleh peneliti tersebut.

Telah ada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian tentang dampak kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit.

Namun yang membedakan adalah fokus penelitian, objek penelitian, hasil dari kesimpulan. Berikut penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Skripsi Een Saputri (2018) mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi yang meneliti tentang “Kesiapan Petani Kelapa Sawit Dalam Menghadapi Peremajaan (*Replanting*) Kebun Di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”. Ia menerapkan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan yang dilakukan oleh petani sawit untuk menghadapi peremajaan kelapa sawit (*replanting*) Kebun Di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
2. Skripsi Yan Fitri Siringoringo (2018) mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis yang meneliti tentang “Kajian Kemampuan Ekonomi Petani Dalam Pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi”. Ia menerapkan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan ekonomi rumah tangga dalam masa peremajaan (*replanting*) kelapa sawit.
3. Skripsi William Hendriono (2017) mahasiswa Universitas Haluoleo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi yang meneliti tentang “Studi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara”. Ia menerapkan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian ini ditujukan untuk

mengetahui dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

4. Skripsi Ichan Darwis (2015) mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi yang meneliti tentang “Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Bulu Mario Kabupaten Mamuju Utara”. Ia menerapkan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Bulu Mario Kabupaten Mamuju Utara.
5. Skripsi Ipan Daputra (2017) mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Jurusan Agribisnis yang meneliti tentang “Persepsi Petani Terhadap Peremajaan Kelapa Sawit Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin”. Ia menerapkan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin.

Penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian “dampak kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”. Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk melihat perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Tabel II.1. Perbandingan Penelitian

Nama	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Een Saputri	Kesiapan Petani Kelapa Sawit Dalam Menghadapi Peremajaan ( <i>Replanting</i> ) Kebun Di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak	Kesiapan petani sawit dalam menghadapi <i>replanting</i>	Masalah peremajaan sawit/ <i>replanting</i> , metode yang digunakan kualitatif	Penelitian terdahulu hanya meneliti tentang persiapan petani dalam menghadapi peremajaan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang dampak setelah terjadinya peremajaan, lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Kerinci Kanan, penelitian ini dilakukan di kecamatan Koto Gasib kabupaten siak
Fitri Siringorin go	Kajian Kemampuan Ekonomi Petani Dalam Pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi	Kemampuan ekonomi petani dalam pelaksanaan peremajaan	Menggunakan metode kualitatif, dengan memuat masalah yang sama yaitu peremajaan.	Penelitian sebelumnya berfokus pada kemampuan ekonomi dalam pelaksanaan peremajaan, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap dampak yang terjadi setelah peremajaan, lokasi penelitian terdahulu di kecamatan Sungai Bahar Kabupaten

				Muaro Jambi, sedangkan penelitian ini di kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak
William Hendriono	Studi Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara	Studi dampak perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat	Menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu meneliti tentang dampak perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini tentang dampak setelah terjadinya peremajaan sawit terhadap masyarakat petani sawit, lokasi penelitian terdahulu di kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara, sedangkan penelitian ini di kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Ichan Darwis	Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara	Dampak keberadaan perusahaan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat	Menggunakan metode kualitatif, meneliti tentang kelapa sawit	Penelitian terdahulu meneliti tentang Dampak Keberadaan Perusahaan Kelapa sawit, sedangkan penelitian ini tentang dampak peremajaan sawit terhadap masyarakat petani sawit, lokasi penelitian terdahulu di kecamatan Sarudu kabupaten Mamuju Utara, sedangkan penelitian sekarang di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak
Ipan Daputra	Persepsi Petani Terhadap Peremajaan( Replanting)Kelapa Sawit Di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin	Persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit di Desa Rawa Jaya Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin	Menggunakan metode kualitatif, peremajaan sawit	Persepsi Petani Terhadap Peremajaan sedangkan penelitian ini tentang dampak peremajaan, lokasi penelitian di kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, sedangkan penelitian ini di kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

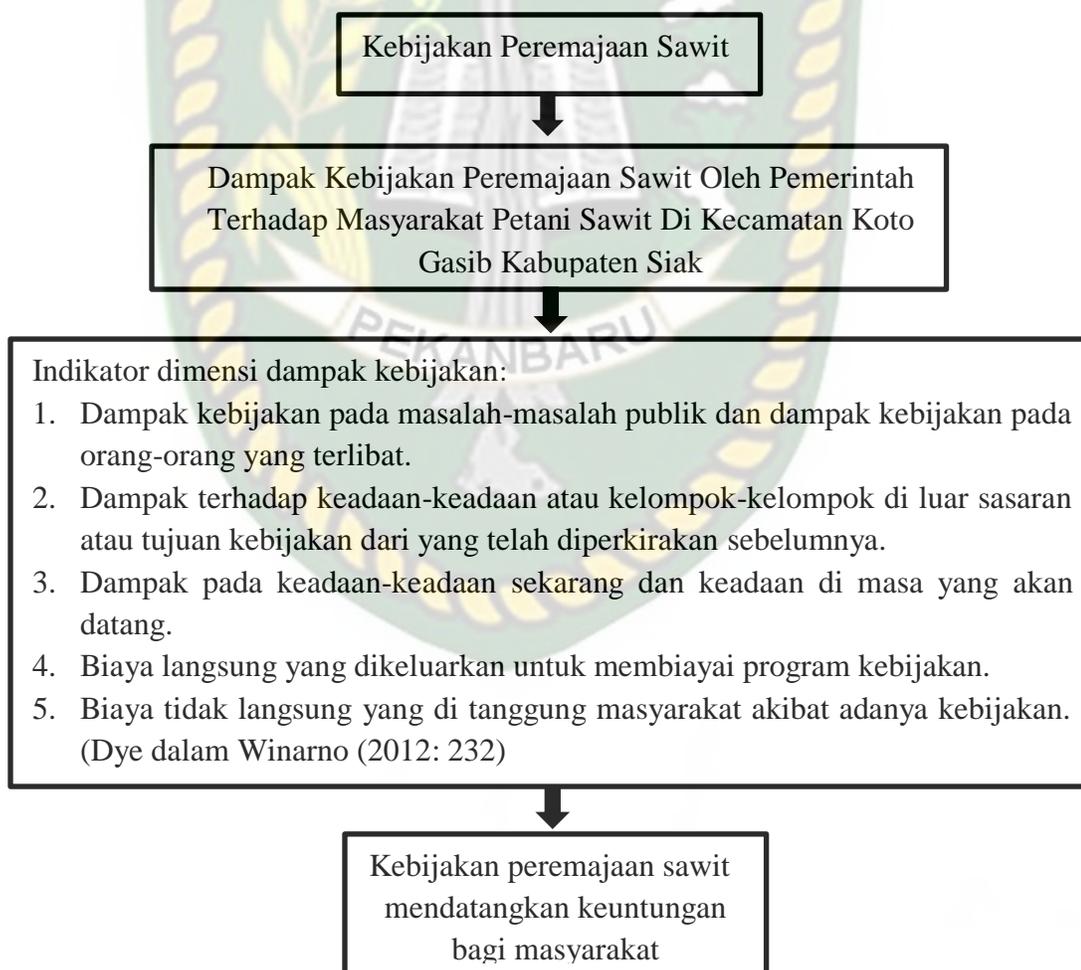
Sumber: Modifikasi Penulis 2019

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta dalam melakukan penelitian dengan judul “dampak kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang kemudian dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang penulis temukan di masyarakat yang khususnya berprofesi sebagai petani sawit.

Maka penulis akan menggambarkan bagaimana pemahaman penulis dalam kerangka pikir yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar II. Kerangka Pemikiran Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

#### D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasikan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat
2. Kelapa sawit adalah tanaman keras sebagai salah satu sumber penghasil minyak nabati yang bermanfaat luas dan memiliki keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya.
3. Peremajaan sawit merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru.
4. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah baik itu lembaga atau badan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan menggunakan program-program atau bentuk upaya-upaya lainnya.
5. Dampak kebijakan merupakan suatu pencerminan hasil dari implementasi kebijakan, maksudnya ialah dalam kebijakan publik dampak merupakan suatu kajian untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan publik itu sendiri.
6. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Dan Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar alasan berusaha.

7. Kondisi ekonomi merupakan aktivitas masyarakat yang bernilai ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari – hari. Kondisi ekonomi dalam masyarakat pada umumnya dijadikan sebagai penilaian dalam pemberian status pada setiap anggota masyarakat.
8. Pendapatan keseluruhan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang.
9. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Sandang adalah pakaian manusia yang merupakan kebutuhan primer pertama, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga pakaian adalah hal yang paling penting.
12. Pangan meliputi pekerjaan dan hal-hal yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan kebutuhan pangan bagi kehidupan. Manusia hidup dalam masyarakat dan membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

## E. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini dan juga mengenai indikator serta item penilaian sebagai batasan dari penelitian, operasional variabel dalam hal ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi konsep, variabel, indikator, item penilaian dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka di buat lah tabel operasional yang dapat di lihat di bawah ini:

**Tabel II.2. Operasional Variabel Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Dimensi dampak kebijakan menurut Dye dalam winarno (2012: 232)	Dampak kebijakan peremajaan sawit	1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.	a. Dampak kebijakan peremajaan sawit terhadap masalah-masalah publik b. Dampak kebijakan peremajaan sawit terhadap petani sawit	Ordinal
		2. Dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya	a. Kebijakan peremajaan sawit mungkin mempunyai dampak terhadap kelompok di luar target b. Tujuan kebijakan peremajaan sawit dari yang telah di perkirakan oleh pembuat kebijakan	Ordinal
		3. Dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang	a. Dampak program/kebijakan peremajaan pada keadaan sekarang b. Dampak program/kebijakan peremajaan di masa	Ordinal

		<p>4. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan</p>	<p>yang akan datang</p> <p>a. Biaya langsung yang di keluarkan petani sawit untuk membiayai kebijakan peremajaan sawit</p> <p>b. Bagaimana petani sawit dalam membiayai biaya langsung kebijakan peremajaan sawit</p>	Ordinal
		<p>5. Biaya tidak langsung yang di tanggung masyarakat akibat adanya kebijakan publik</p>	<p>a. Biaya tidak langsung yang di keluarkan masyarakat akibat adanya kebijakan peremajaan sawit</p> <p>b. Bagaimana petani sawit membiayai biaya tidak langsung akibat adanya kebijakan peremajaan sawit</p>	Ordinal

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini memerlukan teori yang kuat untuk dijadikan dasar berpijak, (*grand theory*). Kedudukan *grand theory* merupakan rujukan terhadap temuan teori di lapangan. Dalam suatu penelitian juga tentunya memerlukan tipe penelitian, pada penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif yang mana tipe penelitian ini akan menggambarkan bagaimana dampak kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah terhadap masyarakat petani sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis pada bab sebelumnya, yang mana cara pengumpulan dan perhitungan data penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Dalam Basuki (2006) pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Kampung Empang Pandang, Tasik Seminai, Keranji Guguh Kecamatan Koto gasib, Kabupaten Siak. Alasan pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian, karena penulis mengetahui bahwa kebun kelapa sawit milik petani sawit sudah memasuki usia tua dan sudah seharusnya dilakukan peremajaan dan juga ketiga kampung merupakan kampung yang memiliki perkebunan sawit yang luas, dan sebagian telah melakukan peremajaan sawit.

### C. Informan Dan Key Informan

Dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan penelitian yang memiliki kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih Informan yang sesuai dengan tujuan Penulis atau yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan masalah pokok penelitian, antara lain:

1. Informan, dalam penelitian ini yang menjadi Informan berjumlah 9 orang informan, yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
2. *Key Informan*, dalam menentukan *key informan* didasarkan pada karakteristik yang sesuai dengan tujuan Penulis atau yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan masalah pokok penelitian. *Key Informan* dalam penelitian ini ada 3 yaitu :
  - 1) TKP3 Kabupaten
  - 2) TKP3 Kecamatan
  - 3) TKP3 Kampung

### D. Teknik Penarikan Informan

Agar mendapatkan informasi maka penulis mengambil informan dengan mengambil informan dan *key informan*. informan penelitian ini adalah masyarakat petani Kelapa Sawit yang terlibat peremajaan kelapa sawit di kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Sedangkan *key informan* penelitian ini adalah tenaga kontrak pendamping pembangunan perkebunan (TKP3).

lokasi penelitian yaitu Kampung Empang Pandan, Tasik Seminai, Keranji Guguh. dan Teknik pengambilan informasi yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Dimana kriteria itu dibuat oleh peneliti sendiri.

Untuk jelasnya besar populasi dan informan dapat dilihat data tabel berikut:

**Tabel III.1. Populasi Penelitian**

NO	Jenis Jabatan	Populasi	Informan
1.	TKP3 kabupaten	1	1
2.	TKP3 Kecamatan	1	1
3.	TKP3 kampung	1	1
4.	Petani sawit	992	9
Jumlah		995	12

**Sumber: Modifikasi Penulis. 2019**

#### E. Jenis Dan Data Sumber

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

##### 2. Data sekunder

Sering disebut metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik:

- a. Wawancara, yaitu cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.
- b. Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.
- d. Studi *Literature*, yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

## G. Teknik Analisis Data

### 1. Reduksi Data

Menurut Pawito (2008) Reduksi merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, ada beberapa tahap dalam mereduksi data, yaitu:

- a. Pengumpulan semua data yang diperoleh baik itu transkrip wawancara, hasil observasi yang berhubungan dengan masalah penelitian menjadi data tertulis,

selain itu dilakukan pengeditan data dengan mengelompokkan dan memilih data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

- b. Menyusun data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk kemudian dikelompokkan dan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Penyusunan konsep-konsep serta penjelasan yang berkenaan dengan kelompok data yang diperoleh saat penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan langkah-langkah yang mengorganisasikan data yaitu menyalin data satu dengan data lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Setelah memilih data dan mereduksi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini, akan dilakukan penyajian berupa hasil wawancara dan beberapa sumber tertulis. Agar mudah dipahami dan tidak keluar dari koridor penelitian, akan digabungkan data yang dikolaborasikan dengan narasi penulis, selanjutnya dilakukan analisa dengan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga proses analisis yang melibatkan teori dengan hasil wawancara tersebut mampu menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

## 3. Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil analisis dan interpretasi data. Sementara verifikasi yang dilakukan yaitu dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, dan bertukar pikiran dengan orang lain. Setelah data disajikan, akan dilakukan analisa data yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi data dengan

mengecek kembali analisa data apakah sesuai dengan catatan lapangan dan hasil observasi, dan memikir ulang analisa yang telah dibuat serta berdiskusi dengan dosen pembimbing.

#### H. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun jadwal dan waktu penelitian yang dibutuhkan penulis dan yang dilakukan mendapatkan hasil penelitian yang akurat dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel III.2 Jadwal Dan Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Tahun 2019-2020															
		November			Desember			Januari			Februari						
1	Penyusunan UP	■	■	■													
2	Seminar UP				■	■	■										
3	Perbaikan UP						■	■									
4	Survey Lapangan							■	■								
5	Analisis Data								■	■							
6	Bimbingan Skripsi									■	■						
7	Perbaikan bab perbab										■	■					
8	Acc skripsi												■	■			
9	Ujian skripsi														■	■	
10	Perbaikan skripsi															■	■
11	Perbanyak/penggunaan skripsi																■

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

##### 1. Sejarah Kabupaten Siak

Pada tahun 1723 M Kesultanan Siak berdiri, dan dirikan oleh Raja Kecil yang bergelar sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dan merupakan putra sultan kesultanan Johor yang bernama Sultan Mahmud Syah dengan istri bernama Encik Pong, Kesultanan Siak pertama kali berpusat di daerah buantan, nama siak berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu tumbuhan siak yang banyak terdapat di daerah tersebut, pada masa awalnya Kerajaan Siak berada dibawah kekuasaan Johor, dan akhirnya ditunjuk dan diangkatnya Sultan Siak pertama sebagai yang memerintah dan mengawasi daerah tersebut. Pada masa sebelum Kesultanan Siak berdiri wilayah siak tidak ada yang memerintah atau menjaga selama hampir 100 tahun, dan wilayah itu hanya diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut hasil cukai hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II dibunuh oleh Magat Sri Rama, sehingga istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, dan setelah itu ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Sultan Siak yang bernama Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di kerajaan Pagaruyung Minangkabau, sementara waktu itu kepemimpinan kerajaan johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecil tumbuh dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Kesultanan Johor, tetapi setelah tahun 1722 kerajaan johor direbut kembali oleh Tengku Sulaiman yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah, dalam merebut

kesultanan johor dari kepemimpinan Raja Kecil, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan bugis, sehingga terjadilah peperangan antar saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak.

Setelah perang berakhir masing-masing pihak mengundurkan diri dari wilayah Johor, pihak johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru dipinggir sungai buantan. Dan demikianlah awal berdirinya negeri baru dipinggir sungai buantan yang merupakan anak sungai siak. Namun pusat Kesultanan Siak tidak menetap di buantan.

Sebelum pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhir kesultananannya, pusat kesultanan sering berpindah-pindah yang pertama di buantan kemudian pindah ke mempura dan setelahnya pindah ke kota pekanbaru yaitu senapelan dan akhirnya kembali ke kabupaten siak, tepatnya di kota Siak Sri Indrapura.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim kesultanan siak banyak mencapai kemajuan dari bidang ekonomi, sehingga kesultanan siak pada masanya terkenal hingga eropa, dan pada masa Sultan Assayaid Syarif Hasyim kesultanan siak membangun istana yang sangat megah di kota siak sri indrapura yang bernama Asseraya Al-Hasyimiah, dengan kemegahannya Siak Sri Indrapura dikenal sebagai kota istana hingga sekarang.

Setelah Sultan Syarif Hasyim wafat beliau digantikan putranya yang pada saat itu masih bersekolah di batavia yang bernama Tengku Sulung Syarif Kasim, dan pada tahun 1915 beliau ditobatkan sebagai sultan ke 12 kesultanan siak dan memiliki gelar kesultanan yaitu Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin, dan terkenal hingga sekarang dengan naman Sultan Syarif Kasim II, pada masa kemerdekaan Negara Indonesia sultan

siak juga meng kibarkan bendera merah putih yang pertama di istana siak dan setelah itu beliau menemui presiden pertama Indonesia Soekarno di Jakarta dan menyatakan ikut bergabungnya kesultanan siak ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pada saat itu beliau sebagai sultan siak menyerahkan mahkota kerajaan dan uang sebesar 10 ribu gulden emas, dan pada waktu itu beliau meninggalkan siak dan bermukim di Jakarta, setelah beliau berusia tua akhirnya kembali ke siak dan akhirnya wafat di rumbai pada tahun 1968.

Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin, dan pada tahun 1999 kabupaten siak meningkat status menjadi kabupaten siak yang sebelumnya dibawah kabupaten bengkalis, dengan ibukota Siak Sri Indrapura sebagai ibukotanya.

## **2. Letak dan batas wilayah**

Secara geografis kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30 – 00 20' 49 lintang utara dan 100 54' 21'' 102° 10' 59'' bujur timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triagle) Indonesia – Malaysia – Singapura. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Siak antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru

- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

### 3. Fisiografi

Bentang alam dari kabupaten siak sebagian besar terdiri atas dataran rendah dibagian wilayah timur dan memiliki sebagian dataran tinggi diwilayah barat, pada umumnya struktur tanah dikabupaten siak terdiri tanah podsolik merah kuning , batuan alluvial , tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa atau tanah basa, sehingga tanah seperti ini cukup subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Kabupaten siak beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° – 32° celsius, dengan kelembapan dan curah hujan yang cukup tinggi.

Selain dikenal dengan sungainya yang membelah wilayah siak, daerah Kabupaten Siak juga terdapat banyak danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Dan sungai siak merupakan sungai yang terkenal dengan kedalaman, sehingga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, terutama dalam hal sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir juga bisa terdapat pada daerah sepanjang sungai siak, karena karena mempunyai dataran tanah yang datar, selain sungai siak, daerah Kabupaten Siak juga di aliri sungai-sungai lain yang lain yaitu sungai mandau, sungai apit, sungai tengah, sungai gasib, sungai buatan, sungai limau, sungai bayam, dan sedangkan danau yang tersebar di kabupaten siak antara lain, danau air hitam, danau besi, danau pulau besar, danau zamrud, danau nagasakti dan danau tasik rawa.

Dan Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan yang menjadi aliran permukaan, maka dapat memungkinkan terjadinya banjir pada bulan-bulan basah, dan analisis data curah hujan Kabupaten Siak diketahui bahwa bulan basah terjadi pada bulan oktober hingga desember, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan juni hingga agustus. Dan curah hujan semakin meninggi ke arah pegunungan bukit barisan yaitu bagian barat wilayah Provinsi Riau.

#### **4. Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan**

Luas Wilayah Kabupaten Siak yaitu 8.556,09 km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Sungai Mandau merupakan kecamatan terluas yaitu 1.705,00 km<sup>2</sup> dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 73,38 km<sup>2</sup>. Kabupaten Siak dibagi dalam 14 Kecamatan dan 131 Kepenghulan/Kelurahan seperti tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 1: Luas Wilayah Kecamatan Dan Kepenghuluan/Kelurahan Di Kabupaten Siak**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kepenghuluan
1.	Minas	343,35	5
2.	Kandis	1.493,65	11
3.	Siak	894,17	8
4.	Sungai Apit	1.346,33	15
5.	Sungai Mandau	1.705,00	9
6.	Kerinci Kanan	128,66	12
7.	Lubuk Dalam	155,09	7
8.	Tualang	343,60	9
9.	Koto Gasib	704,70	11
10.	Dayun	232,24	11
11.	Bunga Raya	151,00	10
12.	Mempura	437,45	8
13.	Sabak Auh	73,38	8
14.	Pusako	544,47	7
<b>Jumlah</b>		<b>8.556,09</b>	<b>131</b>

Sumber: Siak Dalam Angka, 2018

## 5. Kependudukan

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan yang akurat, lengkap dan terkini menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan atau kebijakan publik.

Jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2013 berjumlah 491.967 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 57,50 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Tualang yaitu berjumlah 133.532 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 388,63 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan jumlah

penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Pusako yang berjumlah 6.732 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 12,36 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Siak menurut kecamatan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 2: Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Siak**

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan penduduk (jiwa km <sup>2</sup> )
1.	Minas	34.304	343,35	99,04
2.	Kandis	87.080	1.493,65	58,30
3.	Siak	27.633	894,17	30,90
4.	Sungai Apit	31.524	1.346,33	23,41
5.	Sungai Mandau	7.455	1.705,00	4,37
6.	Kerinci Kanan	27.593	128,66	214,46
7.	Lubuk Dalam	21.383	155,09	137,87
8.	Tualang	133.532	343,60	388,63
9.	Koto Gasib	24.286	704,70	34,46
10.	Dayun	34.271	232,24	147,57
11.	Bunga Raya	26.605	151,00	176,19
12.	Mempura	16.667	437,45	38,10
13.	Sabak Auh	12.902	73,38	175,82
14.	Pusako	6.732	544,47	12,36
<b>Jumlah</b>		491.967	8.556,09	1.541,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 2014

## 6. Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk didominasi batuan lempung (clay), silika, batu pasir dan batu lapis. Formasi ini terdapat di daerah Minas. Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau setara dengan tanah pedzolik merah kuning pada perbukitan dan tropaquepst atau setara dengan tanah alluvial yang sudah mulai berkembang pada bagian daratan rendah, terutama di pinggiran sungai. Tekstur tanah galuh lempung pasiran dan galuh lempung yang makin ke dalam makin

tinggi kadar lempungnya. Struktur tanah gembur sampai gumpal menyudut untuk horison A dan gumpal menyudut untuk horison B yang umumnya memiliki sifat fermeabilitas yang rendah. Wilayah alluvium merupakan daerah rawa-rawa yang terjadi karena gambut yang mengalami proses sedimentasi dari sungai-sungai didekatnya.

## 7. Iklim

Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim yang berlaku di daerah ini juga iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25<sup>0</sup>C sampai dengan 37<sup>0</sup>C dan kelembaban udara 88,9% per bulan. Menurut klasifikasi iklim Koppen, Kabupaten Siak dengan curah hujan yang hampir merata di sepanjang tahun. Jumlah hari hujan pada tahun 2013 mencapai 1.449 hari dan curah hujan sebesar 35.108 mm. Pada tahun 2013 rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Minas yakni 403 mm per bulan per tahun. Sementara jumlah hari hujan paling banyak di Kecamatan Lubuk Dalam sejumlah 177 hari.

### B. Sejarah Kecamatan Koto Gasib

Kecamatan koto gasib merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tualang yang di tetapkan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Siak no 41 tahun 2002 tentang pembentukan kecamatan Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Kandis. Tujuan pemekaran ini adalah untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memotong rentang kendali pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat

sehingga jangkauan pembangunan yang akan lebih baik. Adapun batas kecamatan Koto Gasib antara lain:

- a. Utara : Kecamatan Sungai Mandau dan kecamatan Siak
- b. Selatan : Kecamatan Lubuk Dalam
- c. Barat : Kecamatan Tualang
- d. Timur : Kecamatan Dayun dan Kecamatan Mempura

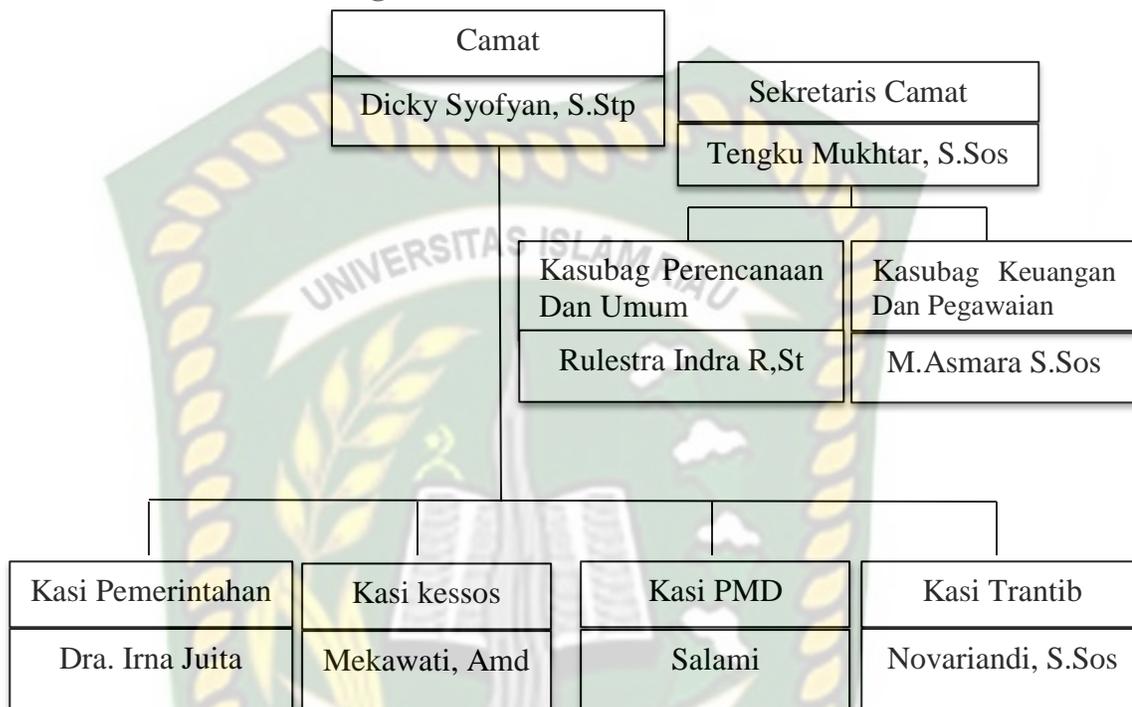
Sejarah mungkin bahwa dahulunya daerah ini mempunyai kerajaan yang besar tepat nya di muara sungai Gasib di daerah pinggir sungai Siak yang bernama kerajaan gasib. Dalam sejarah menyebutkan bahwa kerajaan Gasib ini merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan ini juga merupakan target ekspansi kerajaan Aceh(Utara) pada abad 14 – 15. Negeri ini terkenal dengan kegagahan Penglima Gimban nya dan tersohor dengan kecantikan putri gasib yang bernama Putri Kaca Mayang. Untuk mengingat kembali sejarah tersebut maka wilayah ini di namai dengan Kecamatan Koto Gasib yang awal terdiri dari 9 (sembilan) kampung yaitu Pangkalan Pisang, Kuala Gasib, Sengkemang, Buatan I, Buatan II, Teluk Rimba, Rantau Panjang, Empang Pandan, Dan Keranji Guguh. Kemudian pada tahun 2009 terjadi pemekaran Rantau Panjang yang bernama kampung Sri Gemilang, selanjut nya pada tahun 2011 terjadi pula pemekaran kampung Keranji Guguh yang bernama Kampung Tasik Semina.

Kecamatan Koto Gasib secara umum berada pada daerah dataran dengan mayoritas sektor pertanian didomisili oleh perkebunan kelapa sawit dan karet. Selain itu kecamatan ini terdapat pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor import sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitarnya.

### C. Struktur Organisasi Kantor Koto Gasib

Untuk jelasnya mengenai struktur kantor camat koto gasib dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Gambar. IV.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Koto Gasib**



**Sumber: Kantor Camat Koto Gasib, 2019**

### D. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Siak

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Siak dalam bidang Pertanian yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.8 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

Berikut ini adalah Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari :
  1. Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; dan
  3. Seksi Pembiayaan dan Investasi Pertanian.
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
  1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
  3. Seksi Penyuluhan.
- e. Bidang Perkebunan terdiri dari :
  1. Seksi Perbenihan, Pembibitan dan Perlindungan Tanaman;
  2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **E. Kedudukan Serta Uraian Tugas Pegawai Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak**

### **1. Kedudukan Dinas Pertanian Kabupaten Siak**

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Siak dalam bidang Pertanian yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.8 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

### **2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Siak**

Tugas Pokok Dinas Pertanian Kabupaten Siak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian
2. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian,
  - b. tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan;
  - c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
  - d. pengembangan prasarana pertanian;
  - e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
  - f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
  - g. pembinaan produksi dibidang pertanian;
  - h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
  - i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - k. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
  - l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
  - m. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
  - n. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **F. Peremajaan Sawit Di kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**

### **1. Pendamping Peremajaan Sawit**

Dalam melakukan Peremajaan sawit memerlukan pendamping bagi kelompok tani atau kelembagaan pekebun lainnya merupakan kunci keberhasilan kegiatan peremajaan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan sasaran produktivitas dapat dicapai sesuai potensinya.

Pendamping bertugas mendampingi kelompok tani atau kelembagaan pekebun lainnya dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi maupun keuangan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan peremajaan sesuai standar teknis, tenaga pendamping perlu mendapat pelatihan teknis, administrasi, dan keuangan. Tenaga Pendamping ditetapkan oleh dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota.

## 2. Struktur pendamping peremajaan Sawit

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlukan tenaga pendamping dengan struktur sebagai berikut:

1. Tingkat desa, untuk meningkatkan pengawalan dan pendampingan dalam pelaksanaan peremajaan perlu didukung tenaga pendamping desa yang berdomisili di desa. Dan untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan petugas tenaga pendamping dapat mendayagunakan petugas dinas sebagai pendamping perkebunan di wilayah sasaran
2. Tingkat kecamatan, Pendamping ditingkat kecamatan adalah TKP3 atau petugas dinas yang ditunjuk yang bertempat tinggal di wilayah kerja.
3. Tingkat kabupaten/kota, pendamping ditingkat kabupaten/kota adalah seorang petugas dinas kabupaten/kota atau TKP3 yang bertugas sebagai koordinator pendampingan di wilayah kerja kabupaten/kota.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Dampak Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, peneliti mengambil data yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan. Adapun hasil data berupa identitas dan hasil jawaban informan penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut.

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Identitas Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang dapat diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara jelas dan lengkap tentang permasalahan yang teliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala seksi produksi perkebunan dinas pertanian, pelaksana seksi produksi perkebunan dan pendamping perkebunan sawit rakyat yang di tunjuk dinas sebagai tenaga kontrak pendamping pembangunan perkebunan(TKP3), dan petani sawit di kecamatan koto gasib kabupaten siak.

Identitas informan sangat diperlukan guna memberi informasi dan gambaran yang akurat dalam penelitian ini. Adapun identitas informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## 2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan suatu hal yang sangat penting dalam mempengaruhi suatu pekerjaan atau jabatan tertentu, tingkat pendidikan juga cukup berpengaruh terhadap cara berfikir serta wawasan yang dimiliki seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Siak terlihat tingkat pendidikan informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel.V.1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan**

No	Jabatan Informan	Tingkat Pendidikan						Jumlah (Orang)
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	TKP3 Kabupaten	-	-	-	-	-	1	1
2	TKP3 Kecamatan	-	-	-	-	-	1	1
3	TKP3 Kampung	-	-	-	-	1	-	1
4	Petani Sawit	3	2	4	-	-	-	9
Jumlah								12

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkatan pendidikan informan dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, pada informan penelitian didominasi oleh tingkatan pendidikan SMA yaitu berjumlah 4 orang informan, artinya pada keseluruhan tingkat pendidikan informan di atas dapat dikaitkan tergolong memiliki SDM yang cukup baik. Setelah menjelaskan dan menggambarkan kondisi informan melalui identitas berdasarkan tingkatan pendidikan, Kemudian dijelaskan jumlah informan berdasarkan umur, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur informan penelitian.

### 3. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Umur yang berbeda dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan kinerja sehingga akan menjadi pertimbangan terhadap inovasi dan kreativitas dalam pekerjaan.

Adapun tingkat umur informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel V.2. Jumlah Informan Berdasarkan Umur Tentang Dampak Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**

NO	Jabatan Informan	Tahun Umur					Jumlah (Orang)
		20-29	30-39	40-49	50-59	60	
1	TKP3 Kabupaten			1			1
2	TKP3 Kecamatan		1				1
3	TKP3 Kampung	1					1
4	Petani Sawit	1	1	5	2		9
Jumlah							12

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Dalam penelitian ini informan berjumlah 12 orang, setelah menjelaskan dan menggambarkan kondisi informan melalui identitas berdasarkan umur, Kemudian dijelaskan jumlah informan berdasarkan jabatan, dengan tujuan untuk mengetahui jabatan informan penelitian. Adapun jabatan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel V.3. Identitas Informan Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan Informan	Jumlah (orang)
1	Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Siak (TKP3 Tingkat Kabupaten)	1
2	Pelaksana Seksi Produksi Perkebunan (TKP3 Tingkat Kecamatan)	1
3	Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat (TKP Tingkat Kampung)	1
4	Petani Sawit	9
Jumlah		12

**Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang meliputi Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Sebagai Koordinator TKP3 Kabupaten 1 orang, Pelaksana Seksi Produksi Perkebunan Sebagai TKP3 Kecamatan 1 orang, Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat Sebagai TKP3 Kampung 1 orang dan Petani Sawit sebagai orang yang terlibat dalam Kebijakan Peremajaan Sawit sebanyak 9 orang.

### **B. Pembahasan Penelitian Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**

Tentang Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, penulis menetapkan 12 informan yang terdiri dari Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Sebagai Koordinator TKP3 Kabupaten, Pelaksana Seksi Produksi Perkebunan Sebagai TKP3 Kecamatan, Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat Sebagai TKP3 Kampung dan Petani Sawit sebagai orang yang terlibat dalam Kebijakan Peremajaan Sawit.

Fokus penulis dalam penelitian ini ialah tentang Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, yang bertujuan untuk mengetahui masalah dan hambatan masyarakat petani sawit dalam menjalankan kebijakan peremajaan sawit.

Kelapa Sawit adalah tanaman keras sebagai salah satu sumber penghasil minyak nabati yang bermanfaat luas dan memiliki keunggulan dibandingkan minyak nabati lainnya. Industri kelapa sawit terdiri dari beberapa segmen industri yaitu budidaya perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit menjadi *crude palm oil* (CPO) dan

perdagangan. Umumnya industri yang banyak diusahakan di Indonesia adalah segmen perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau, karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit. Untuk masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap usaha tani kelapa sawit. Ini terbukti semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara swadaya.

Peremajaan kelapa sawit merupakan proses peremajaan kelapa sawit dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya semakin menurun setiap bulannya. Untuk melaksanakan kegiatan peremajaan perlu terlebih dahulu dilaksanakan persiapan antara lain penumbuhan, pemberdayaan kelembagaan pekebun dan perbaikan komponen budidaya tanaman kelapa sawit. Sebelum pelaksanaan kegiatan peremajaan diperlukan beberapa kegiatan pendukung agar memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Adapun kegiatan tersebut mencakup Pra Peremajaan, Persiapan Administrasi, Persiapan Teknis Lapangan, Persiapan Penumbuhan Kelembagaan dan Persiapan Pendampingan.

Terkait dengan Dampak Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, penulis telah melakukan wawancara langsung dengan kepala seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian, pelaksana seksi produksi perkebunan dan Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat yang

ketiganya ditunjuk dinas pertanian kabupaten siak sebagai TKP3/FASDA yang bertugas sebagai pendampingan di wilayah kerja kabupaten.

### **1. Dampak Kebijakan Pada Masalah Publik Dan Dampak Kebijakan Pada Orang-Orang Yang Terlibat**

Suatu kebijakan mungkin mempunyai konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan atau malahan kedua-duanya. Dampak kebijakan pada masalah publik dan dampak kebijakan pada orang terlibat disini ialah dampak yang terjadi terhadap masyarakat petani sawit terhadap adanya kebijakan peremajaan sawit oleh pemerintah. Untuk melihat tanggapan informan mengenai dampak kebijakan pada masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat terhadap kebijakan peremajaan sawit.

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten siak. Yaitu bapak Candra Rivana, saat saya wawancarai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 18 november 2019 beliau mengatakan tentang bagaimana dampak kebijakan peremajaan sawit terhadap petani sawit sebagai orang-orang yang terlibat. Berikut hasil wawanca dengan beliau:

“Kebijakan peremajaan kebun kelapa sawit adalah untuk meremajakan kebun-kebun kelapa sawit yang secara ekonomis tidak produktif lagi baik disebabkan oleh umur tanaman yang sudah tua (> 25 tahun), penggunaan bibit tidak unggul dan kerapatan tanaman yang sudah berkurang karena mati/penyakit ( < 90 pohon/ha) yang berakibat pada menurunnya penghasilan dan perikehidupan pekebun/petanisawit. Pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit menjadi hal yang krusial dan harus dilaksanakan petani sawit untuk memperbaiki taraf hidup dan penghasilan keluarganya, apalagi saat ini bibit-bibit unggul yang diproduksi oleh produsen benih kelapa sawit memiliki potensi produksi mencapai lebih 30 ton TBS per ha/thn sehingga akan jelas berdampak positif bagi kesejahteraan pekebun dengan menerapkan standar-standar peremajaan kebun kelapa sawit yang sudah diatur oleh pemerintah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa peremajaan kebun kelapa sawit menjadi hal yang krusial dan harus dilaksanakan petani sawit untuk memperbaiki taraf hidup dan penghasilan keluarganya, dengan bibit-bibit unggul yang diproduksi oleh produsen benih kelapa sawit memiliki potensi produksi mencapai lebih 30 ton TBS per ha/tahun sehingga akan jelas berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat petani sawit.

Dilanjutkan oleh Bapak Siswanto, sebagai pelaksana seksi produksi perkebunan pada saat saya wawancarai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 19 november 2019, beliau mengatakan bahwa:

“Sangat berdampak positif terhadap petani sawit, dikarenakan sangat membantu petani sawit yang memiliki kebun kelapa sawit yang telah memasuki masa peremajaan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dampak kebijakan peremajaan sawit sangat berdampak positif terhadap masyarakat petani sawit, karena sangat membantu petani sawit yang memiliki kebun kelapa sawit yang telah memasuki masa peremajaan.

Ditambah oleh Bapak Nanang Nurhidayah sebagai Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat pada saat saya wawancarai di kantor dinas pertanian kabupaten siak pada tanggal 19 november 2019, beliau menambahkan bahwa.

“Dengan adanya Peremajaan Sawit Rakyat petani bisa terbantu melalui modal peremajaan yg diserahkan secara hibah dari BPDPKS dengan besaran 25 Jt / Ha Program PSR(Peremajaan Sawit Rakyat) mempunyai tujuan yang salah satunya untuk menerapkan sistem Perkebunan Berkelanjutan. Sehingga petani yang mengikuti program ini akan bertambah pengetahuannya terutama tentang sistem perkebunan berkelanjutan dan selama ini perlakuan petani terhadap kebun sawitnya tidak sesuai dengan sistem perkebunan berkelanjutan Salah satu syarat mengikuti program PSR yaitu adanya kelembagaan pekebun sehingga syarat ini mengaktifkan kembali kelompok-kelompok sawit yang selama ini sudah tidak

aktif ditinggalkan oleh anggota kelompok nya karena ada perbedaan pendapat terutama masalah harga jual TBS sehingga petani menjual TBS nya langsung kepada toke/tengkulak sawit. Dan tanpa mereka sadari hal seperti itu malah berdampak negatif kepada mereka sendiri, misanyal: jadwal pemanenan & pemupukan yg tidak teratur,tidak adanya perawatan jalan kebun,dll”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peremajaan Sawit memiliki dampak positif dalam jangka panjang karena mempunyai tujuan yg salah satunya untuk menerapkan sistem Perkebunan Berkelanjutan. Sehingga petani yang mengikuti program ini akan bertambah pengetahuannya terutama tentang sistem perkebunan berkelanjutan dan selama ini perlakuan petani terhadap kebun sawitnya tidak sesuai dengan sistem perkebunan berkelanjutan. Salah satu syarat mengikuti kebijakan peremajaan sawit yaitu adanya kelembagaan pekebun sehingga syarat ini mengaktifkan kembali kelompok-kelompok sawit yang selama ini sudah tidak aktif.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Didik Prasetyo selaku petani sawit yang melaksanakan peremajaan sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Pada saat saya wawancarai di kediaman beliau tanggal 20 november 2019

“Dampak nya saya mengalami kehilangan penghasilan sehari-hari, karena kebun sawit saya sedang diremajakan sehingga tidak ada yang bisa di panen dan harus mencari pekerjaan lain sambil menunggu masa tunggu peremajaan dan kebun sawit bisa di panen kembali”.

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, peremajaan sawit mempunyai dampak sementara terhadap masyarakat petani sawit, petani sawit mengalami kehilangan penghasilan sehari-hari, karena kebun sawit sedang diremajakan maka petani sawit harus mencari pekerjaan lain sambil menunggu masa tunggu peremajaan dan kebun sawit yang diremajakan bisa dipanen kembali.

Kemudian dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa peremajaan kebun kelapa sawit memang harus dilaksanakan petani sawit untuk memperbaiki taraf hidup dan penghasilan keluarganya dimasa yang akan datang, karena Kebijakan peremajaan adalah untuk meremajakan kebun-kebun kelapa sawit yang secara ekonomis tidak produktif lagi baik disebabkan oleh umur tanaman yang sudah tua atau penggunaan bibit tidak unggul. Maka harus diremajakan dengan mengganti dengan bibit-bibit unggul yang diproduksi oleh produsen benih kelapa sawit yang memiliki potensi produksi mencapai lebih 30 ton TBS per ha/tahun, sehingga akan jelas berdampak positif bagi kesejahteraan petani sawit dengan menerapkan standar-standar peremajaan kebun kelapa sawit yang sudah diatur oleh pemerintah.

Dan berdasarkan analisis peneliti peremajaan sawit mempunyai dampak sementara terhadap masyarakat petani sawit, dalam melakukan peremajaan sawit petani sawit mengalami kehilangan penghasilan sehari-hari, sehingga masih banyak masyarakat petani sawit yang belum melakukan peremajaan sawit, sehingga pemerintah perlu memberikan solusi-solusi masalah yang terjadi terhadap masyarakat yang berdampak peremajaan, sehingga kebijakan peremajaan sawit yang mempunyai tujuan salah satunya untuk menerapkan sistem Perkebunan Berkelanjutan dapat berjalan dengan baik kedepannya.

## **2. Dampak Terhadap Keadaan Kelompok Di Luar Sasaran dan Tujuan Kebijakan Dari Yang Telah Diperkirakan Sebelumnya**

Yang dimaksud dampak disini ialah dampak yang terjadi terhadap kelompok diluar masyarakat petani sawit yang mengalami dampak kebijakan peremajaan sawit, dan

tujuan kebijakan peremajaan sawit dari yang telah diperkirakan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Siak. Yaitu bapak Candra Rivana, saat saya wawancarai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 18 november 2019 beliau mengatakan tentang bagaimana dampak terhadap keadaan kelompok di luar sasaran dan tujuan kebijakan peremajaan sawit dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit juga berdampak kepada pihak-pihak lain untuk jangka pendek seperti kepada penangkar bibit, pelaku penyewaan jasa alat berat dan perluasan tanam komoditi hortikultura dan pangan melalui kegiatan tumpang sari dilahan peremajaan tahap P1 dan P2 Dampak jangka panjang adalah aktifnya kembali kelembagaan pekebun dan terpenuhinya suplai TBS yang berkualitas bagi pabrik pengolahan kelapa sawit mitra pekebun dan Tujuan peremajaan kebun kelapa sawit yaitu Mengganti bahan tanaman dengan bibit yang lebih unggul, Meningkatkan performa/ keragaan tanaman TBM dan TM yang lebih baik, Meningkatkan produktivitas lahan, Menghasilkan tanaman dengan produksi TBS yang tinggi dan berkualitas, Meningkatkan kesejahteraan pekebun”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit juga berdampak kepada pihak-pihak lain untuk jangka pendek seperti kepada penangkar bibit, pelaku penyewaan jasa alat berat dan perluasan tanam komoditi hortikultura dan pangan melalui kegiatan tumpang sari dilahan peremajaan tahap peremajaan ke 1 dan peremajaan ke 2. Sedangkan dampak jangka panjang adalah aktifnya kembali kelembagaan pekebun dan terpenuhinya suplai TBS yang berkualitas bagi pabrik pengolahan kelapa sawit mitra pekebun sedangkan Tujuan peremajaan kebun kelapa sawit yaitu Mengganti bahan tanaman dengan bibit yang lebih unggul,

Meningkatkan performa keragaan tanaman TBM dan TM yang lebih baik, meningkatkan produktivitas lahan, menghasilkan tanaman dengan produksi TBS yang tinggi dan berkualitas, meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Dilanjutkan oleh Bapak Siswanto sebagai pelaksana seksi produksi perkebunan pada saat saya wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 19 november 2019.

“Ada, yang sangat terdampak adalah profesi buruh harian lepas karena semakin banyak pekerjaan yang ada di desa tersebut, juga berdampak hilangnya pekerjaan bagi buruh panen dan tujuan peremajaan adalah dapat membantu petani yang mempunyai tanaman sawit yang sudah tua untuk peremajaan sehingga produksi CPO Indonesia tidak terputus dan peran pemerintah melalui dinas pertanian sebagai unsur pelaksana yaitu sebagai pendamping dan pengawalan dalam peremajaan dimulai dari persiapan petani, kelembagaan derta lahan yang akan diremajakan”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan peremajaan sawit sangat mempunyai dampak positif terhadap profesi buruh harian lepas karena semakin banyak pekerjaan yang ada di desa tersebut, tetapi peremajaan sawit sangat berdampak negatif karena hilangnya pekerjaan bagi buruh panen kebun sawit sedangkan tujuan peremajaan adalah dapat membantu masyarakat petani sawit yang mempunyai tanaman sawit yang sudah tua, sehingga apabila diperemajakan dapat menambah produksi CPO Indonesia kedepannya agar tidak terputus.

Ditambah oleh Bapak Nanang Nurhidayah sebagai Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat pada saat saya wawancara di kantor dinas pertanian kabupaten siak pada tanggal 19 november 2019

“Dalam masa pembangunan perkebunan/masa peremajaan ada 2 pola yang direkomendasikan pemerintah yaitu: Sistem tumpang serempak dengan *cover crop* (tanaman kacang), dan Sistem tumpang serempak dengan *inter crop* (tanaman tumpang sari). Sistem tanaman tumpang sari ini bertujuan untuk membantu perekonomian petani sawit yang penghasilannya telah berkurang selama masa pembangunan perkebunan/peremajaan. Namun ada juga beberapa petani sawit yang tidak melakukan metode ini dikarenakan kegiatan/pekerjaan sampingan mereka diluar dari kebunnya dan masih banyak penyebab lainnya. Hal ini tentu membuka peluang bagi para petani/kelompok tanaman pangan & hortikultura untuk menambah luas tanam nya dengan menumpang di lahan peremajaan dengan kesepakatan sistem bagi hasil ataupun sistem kontrak. Sedangkan tujuan peremajaan adalah untuk Membantu petani dalam permodalan pembangunan kebun sawitnya dengan dana hibah yang diberikan Menerapkan sistem perkebunan berkelanjutan yang dampak positifnya sangat banyak bagi petani tersebut namun hal ini belum banyak diketahui oleh para petani sawit Dalam program peremajaan ini dinas berperan aktif sebagai pendamping dan pembimbing petani dalam hal pendampingan pengajuan persyaratan peremajaan, persiapan sebelum melakukan peremajaan, selalu mendampingi petani dalam mencari solusi dari masalah-masalah yang timbul akibat peremajaan dan memberikan bantuan kepada petani untuk meningkatkan perekonomiannya, seperti: memberikan bantuan bibit tanaman tumpang sari, dll”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam masa pembangunan perkebunan/masa peremajaan ada 2 pola yang direkomendasikan pemerintah yaitu: Sistem tumpang serempak dengan *cover crop* (tanaman kacang), dan Sistem tumpang serempak dengan *inter crop* (tanaman tumpang sari).

Sistem tanaman tumpang sari ini bertujuan untuk membantu perekonomian petani sawit yang penghasilannya telah berkurang selama masa pembangunan perkebunan/peremajaan Hal ini tentu membuka peluang bagi para petani/kelompok tanaman pangan & hortikultura untuk menambah luas tanam nya dengan menumpang di lahan peremajaan dengan kesepakatan sistem bagi hasil ataupun sistem kontrak.

Sedangkan tujuan peremajaan adalah untuk Membantu petani dalam permodalan pembangunan kebun sawitnya dengan dana hibah yang diberikan. Menerapkan sistem perkebunan berkelanjutan yang dampak positifnya sangat banyak bagi petani tersebut namun hal ini belum banyak diketahui oleh para petani sawit. Dalam kebijakan peremajaan ini dinas berperan aktif sebagai pendamping dan pembimbing petani dalam hal pendampingan pengajuan persyaratan peremajaan, persiapan sebelum melakukan peremajaan, selalu mendampingi petani dalam mencari solusi dari masalah-masalah yang timbul akibat peremajaan dan memberikan bantuan kepada petani untuk meningkatkan perekonomiannya.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Didik Prasetyo selaku petani sawit yang melaksanakan peremajaan sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Pada saat saya wawanca di kediaman beliau tanggal 20 november 2019.

“Iya, karena sawit sedang tumbang/peremajaan sehingga buruh panen banyak yang berhenti dari pekerjaan sehari-harinya dan mencari pekerjaan lain, atau mencari pekerjaan didaerah yang kebun sawit nya masih pendek/usia muda, tujuan peremajaan yang saya tau mengganti pohon sawit yang sudah tua diganti dengan sawit usia muda yang bibitnya unggul”.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, peremajaan sawit sangat berdampak sementara terhadap buruh panen karena kehilangan pekerjaan sehari-harinya, dan tujuan peremajaan adalah mengganti kebun sawit yang berusia tua dengan sawit yang berbibit unggul sehingga kedepannya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat petani sawit.

Kemudian dari hasil observasi yang penulis lakukan bahwa dalam peremajaan sawit ada 2 pola yang direkomendasikan pemerintah yaitu: Sistem tumbang serempak

dengan *cover croop* (tanaman kacang), dan Sistem tumbang serempak dengan *inter croop* (tanaman tumpang sari). Sistem tanaman tumpang sari ini bertujuan untuk membantu perekonomian petani sawit yang penghasilannya telah berkurang selama masa tunggu peremajaan. Hal ini tentu membuka peluang bagi para petani/kelompok tanaman pangan & hortikultura untuk menambah luas tanamnya dengan menumpang di lahan peremajaan dengan kesepakatan sistem bagi hasil ataupun sistem kontrak. Sedangkan tujuan peremajaan adalah untuk membantu petani dalam permodalan pembangunan kebun sawitnya dengan dana hibah yang diberikan serta menerapkan sistem perkebunan berkelanjutan yang berdampak positifnya bagi petani sawit.

Dan berdasarkan dari analisis peneliti bahwa dalam peremajaan sawit ada 2 profesi yang sangat terdampak terhadap adanya kebijakan peremajaan sawit yang pertama profesi buruh harian lepas, peremajaan sawit sangat berdampak positif bagi profesi buruh harian lepas karena semakin banyak pekerjaan yang ada di desa tersebut, meliputi kegiatan penangkar bibit, penanaman komoditi hortikultura dan pangan melalui kegiatan tumpang sari di lahan peremajaan dengan kebanyakan melibatkan buruh harian lepas. Yang kedua buruh panen, berbeda dengan buruh harian lepas yang berdampak positif, peremajaan sawit sangat berdampak negatif bagi buruh panen karena hilangnya pekerjaan mereka karena kebun sawit dalam masa peremajaan. sehingga pemerintah melalui dinas pertanian perlu melakukan bantuan berupa menyediakan pekerjaan sementara selama masa tunggu peremajaan. Dengan demikian dapat membantu meringankan beban masyarakat khusus yang berprofesi sebagai buruh panen.

### 3. Dampak Pada Keadaan Sekarang Dan Keadaan Dimasa Yang Akan Datang

Suatu kebijakan direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk keadaan sekarang atau keadaan dimasa yang akan datang, sedangkan yang dimaksud dampak disini ialah dampak yang terjadi terhadap masyarakat petani sawit dimasa yang sekarang dan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten siak. Yaitu bapak Candra Rivana, saat saya wawancarai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 18 november 2019 beliau mengatakan tentang bagaimana Bagaimana kebijakan peremajaan sawit pada keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang. Berikut hasil wawanca dengan beliau:

“Sekarang Prosedur pengajuan makin sederhana dan sudah lebih mudah karena dilakukan secara online. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti masih kurangnya minat pekebun untuk ikut program peremajaan karena sawitnya masih menghasilkan walaupun sudah berumur > 25 tahun, masih banyak pinjaman di bank, tidak ada sumber penghasilan apabila kebun diremajakan. Persoalan lain terkait proses melengkapi dokumen, menginput data, verifikasi yang memerlukan banyak energy dan perhatian dan harapan dimasa kedepannya semoga semakin banyak pekebun yang bersedia melakukan peremajaan kebun yang sudah tidak ekonomis, peremajaan berjalan sukses dan semua stakeholder ikut membantu mensukseskan program ini”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan peremajaan kebun kelapa sawit pada masa sekarang untuk Prosedur pengajuan makin sederhana dan sudah lebih mudah karena dilakukan secara online. Tetapi masih ada Hambatan-hambatan yang terjadi seperti masih kurangnya minat pekebun untuk ikut kebijakan peremajaan karena sawitnya masih menghasilkan walaupun sudah berumur > 25 tahun, masih banyak pinjaman di bank, tidak ada sumber penghasilan apabila kebun diremajakan, dan dimasa yang akan datang diharapkan semakin banyak pekebun yang

bersedia melakukan peremajaan kebun yang sudah tidak ekonomis dan sudah memasuki usia tua.

Dilanjutkan oleh Bapak Siswanto sebagai pelaksana seksi produksi perkebunan pada saat saya wawanca di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 19 november 2019

“Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan peremajaan kebun, karena terjadinya krisis kepercayaan terhadap pengurus KUD dan harapan dimasa yang akan datang meningkatnya kesadaran petani untuk melakukan peremajaan kebun sawitnya”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan peremajaan sawit dimasa sekarang masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan peremajaan kebun sawitnya, dikarenakan terjadinya krisis kepercayaan terhadap pengurus koprasi unit desa (KUD) sehingga banyak masyarakat yang takut dalam menghadapi masa tunggu peremajaan karena tidak adanya sumber biaya.

Ditambah oleh Bapak Nanang Nurhidayah sebagai Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat pada saat saya wawancarai di kantor dinas pertanian kabupaten siak pada tanggal 19 november 2019

“Yang terjadi saat ini adalah minimnya kesadaran petani untuk melakukan peremajaan sawitnya padahal umur sawit mereka sudah melebihi batas masa produktif dan ini berdampak dengan menurunnya penghasilan mereka sendiri. Dan kebanyakan petani beranggapan bahwa mereka masih optimis kebunnya masih bisa memproduksi normal bahkan masih bisa ditingkatkan dengan perawatan/pemupukan yg maksimal. Ada juga beberapa hambatan seperti petani yang belum sanggup kehilangan penghasilan pokoknya dari kebun sawit bila diremajakan, masalah hutang bank yang masih dijalani / belum terlunasi oleh petani, dll. Namun dalam hal ini pemerintah kabupaten aktif melakukan sosialisasi keliling desa dengan menggandeng pihak-pihak/instansi terkait peremajaan untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat dan memberikan

solusi-solusi dari masalah yang ada. Harapan dimasa yang akan datang terciptanya kesejahteraan petani melalui sistem perkebunan yang berkelanjutan untuk memperbaiki pola petani saat ini dalam berkebun yang bisa dikatakan dapat merusak lingkungan atau ekosistem”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya kesadaran petani untuk melakukan peremajaan sawitnya padahal umur sawit sudah melebihi batas masa produktif dan kebanyakan petani beranggapan bahwa mereka masih optimis kebunnya masih bisa berproduksi normal bahkan masih bisa ditingkatkan dengan perawatan/pemupukan yang maksimal. Dan ada juga beberapa hambatan seperti petani yang belum sanggup kehilangan penghasilan pokoknya dari kebun sawit bila diremajakan, masalah hutang bank yang masih dijalani / belum terlunasi oleh petani, dan diharapkan dimasa yang akan datang terciptanya kesejahteraan petani melalui Sistem Perkebunan yang berkelanjutan untuk memperbaiki pola petani saat ini dalam berkebun yang bisa dikatakan dapat merusak lingkungan atau ekosistem.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Didik Prasetyo selaku petani sawit yang melaksanakan peremajaan sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Pada saat saya wawancara di kediaman beliau tanggal 20 november 2019

“Sekarang masih banyak petani sawit yang belum mengikuti peremajaan karena belum sanggup kehilangan penghasilan, apalagi banyak petani sawit yang masih memiliki masalah hutang bank yang masih belum lunas, jadi tidak bisa meminjam bank kembali untuk biaya persiapan masa sawit tumbang/peremajaan, harapan saya dimasa yang akan datang semoga kebun sawit yang selesai diremajakan yang usianya masih muda hasilnya melebihi sebelum diremajakan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, masih banyaknya petani sawit yang belum mengikuti peremajaan, dikarenakan belum sanggup kehilangan penghasilan dan masih memiliki tanggungan hutang bank yang belum terlunasi sehingga

tidak bisa meminjam bank kembali untuk biaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari pada masa tunggu peremajaan.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan masih minimnya kesadaran petani sawit untuk melakukan peremajaan, karena banyak petani sawit berpendapat sawitnya masih menghasilkan walaupun sudah berumur 25 tahun lebih, sedangkan alasan lainnya tidak adanya sumber penghasilan apabila dilakukannya peremajaan.

Dan berdasarkan analisis peneliti masih banyaknya masyarakat petani sawit yang belum melakukan peremajaan dikarenakan banyak masyarakat petani sawit yang belum sanggup kehilangan penghasilan setiap bulannya, dan masih banyaknya petani sawit yang memiliki hutang dibank sebelumnya, sehingga apabila dilakukan peremajaan pada kebun sawitnya, ditakutkan tidak dapat membayar tagihan hutang bank yang diwajibkan setiap bulannya. Sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan disini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan solusi-solusi dari masalah yang ada terkait dampak peremajaan sawit ini.

#### **4. Biaya Langsung Yang Dikeluarkan Untuk Membiayai Program Kebijakan**

Yang dimaksud biaya disini ialah biaya yang ditujukan terhadap masyarakat petani sawit dalam membiayai kebijakan peremajaan sawit. Berdasarkan wawancara penelitian dengan Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten siak. Yaitu bapak Candra Rivana, saat saya wawancarai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 18 november 2019 beliau mengatakan tentang biaya yang dikeluarkan petani sawit dalam pembiayaan kebijakan peremajaan sawit. Berikut hasil wawanca dengan beliau:

“Pemerintah memberikan bantuan Dana hibah Rp. 25 juta/ha, agar petani sawit dapat meremajakan kebun kelapa sawitnya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp 25 juta/ha, dan dana ini digunakan petani sawit untuk meremajakan sawit nya.

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Siswanto sebagai pelaksana seksi produksi perkebunan pada saat saya wawancarai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 19 november 2019

“YA, dalam bentuk bantuan dana hibah 25 juta/ha dana ini untuk kegiatan peremajaan tahap awal meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan disalurkan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Pendanaan peremajaan sawit diberikan bantuan dana 25 juta/ha, dana bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan peremajaan sawit,pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan.

Ditambah oleh Bapak Nanang Nurhidayah sebagai Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat pada saat saya wawancarai di kantor dinas pertanian kabupaten siak pada tanggal 19 november 2019

“Pemerintah berperan sebagai pendamping dan menjembatani petani dalam memperoleh bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat dari program BPDPKS (Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit)”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah berperan penting sebagai pendamping dan menjembatani petani sawit dalam memperoleh bantuan dana peremajaan sawit dari badan pengelola dana peremajaan kelapa sawit (BPDPKS).

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Didik Prasetyo selaku petani sawit yang melaksanakan peremajaan sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Pada saat saya wawancarai dikediaman beliau tanggal 20 november 2019

“Iya, Pemerintah memberikan dana hibah 25 juta/ha untuk peremajaan kebun sawit”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat berperan penting terhadap petani sawit dengan mendampingi dan menjebatani petani sawit dalam memperoleh dana 25 juta/ha untuk kegiatan peremajaan sawit.

Kemudian dari hasil observasi yang penulis lakukan pemerintah sangat berperan penting terhadap petani sawit dengan mendampingi dan menjebatani petani sawit dalam memperoleh dana untuk kegiatan peremajaan sawit. Dan Pemerintah memberikan bantuan Dana hibah Rp. 25 juta/ha dari BPDPKS, dana tersebut untuk kegiatan peremajaan tahap awal meliputi persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan disalurkan kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi/ kelembagaan pekebun lainnya.

Dan berdasarkan analisis peneliti pemerintah memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp. 25 juta/ha, dana ini hanya untuk peremajaan sawit, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat petani sawit harus memiliki tabungan atau kebun sawit yang belum diremajakan. Tetapi apabila tidak memiliki tabungan atau kebun sawit yang belum diremajakan, inilah yang menjadi kekhawatiran petani sawit dalam melaksanakan peremajaan, karena dengan kebun sawitnya diremajakan otomatis masyarakat petani sawit tidak memiliki penghasilan setiap bulannya. Sehingga banyak

petani sawit yang lebih memilih mempertahankan kebun sawitnya dan belum melakukan peremajaan.

#### **5. Biaya Tidak Langsung Yang Ditanggung Masyarakat Akibat Adanya Kebijakan Publik**

Yang dimaksud Biaya disini ialah biaya yang ditanggung masyarakat petani sawit dalam membiayai kebutuhan sehari-hari pada masa peremajaan dan apakah pemerintah memberikan bantuan terhadap masyarakat petani sawit dalam masa tunggu peremajaan.

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Kepala Seksi Produksi Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Siak. Yaitu bapak Candra Rivana, saat saya wawancarai di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 18 november 2019 beliau mengatakan tentang biaya tidak langsung yang dikeluarkan petani sawit dalam dalam masa tunggu kebijakan peremajaan sawit. Berikut hasil wawanca dengan beliau:

“Untuk Pendanaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan, setelah menerima dana hibah 25 juta/ha dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan. Kelompok tani/gapoktan/koperasi/ lainnya sejak awal harus dipersiapkan untuk dapat mengakses kredit perbankan, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, untuk pendanaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan, setelah menerima dana hibah 25 juta/ha dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan, Kelompok tani/gapoktan/koperasi/ lainnya sejak awal harus dipersiapkan untuk dapat mengakses kredit perbankan.

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Siswanto sebagai pelaksana seksi produksi perkebunan pada saat saya wawancarai di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Siak pada tanggal 19 november 2019

“Setelah menerima dana hibah 25 juta/ha dari BPDPKS, sampai tanaman kembali menghasilkan bersumber dari tabungan pekebun atau kredit perbankan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setelah menerima dana hibah 25 juta/ha dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari tabungan pekebun atau kredit perbankan.

Ditambah oleh Bapak Nanang Nurhidayah sebagai Pendamping Perkebunan Sawit Rakyat pada saat saya wawancara di kantor dinas pertanian kabupaten siak pada tanggal 19 november 2019

“Setelah memperoleh bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat dari program BPDPKS, dan selama masa tunggu peremajaan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan. Maka sejak awal petani sawit diminta untuk mempersiapkan tabungan dan apabila tidak ada tabungan maka diminta meminjam bank guna menghadapi masa tunggu peremajaan”.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani sawit yang telah memperoleh bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat dari program BPDPKS, dan selama masa tunggu peremajaan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan. Maka sejak awal petani sawit harus dipersiapkan untuk dapat mengakses kredit perbankan guna menghadapi masa tunggu peremajaan.

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Bapak Didik Prasetyo selaku petani sawit yang melaksanakan peremajaan sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Pada saat saya wawancarai dikediaman beliau pada tanggal 20 november 2019

“Untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari saya meminjam dibank, tetapi apabila masih ada tanggungan hutang dibank sebelumnya maka tidak mungkin meminjam lagi, sehingga sekarang masih banyak petani sawit yang belum mengikuti peremajaan karena takut berkurangnya/hilangnya penghasilan setiap bulannya, sehingga banyak sawitnya yang belum ditumbang/remajakan, dan masih adanya hutang yang wajib dibayar setiap bulannya”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari petani sawit harus memanfaatkan tabungan dan kredit perbankan, tetapi banyak petani sawit sebelumnya telah ada tanggungan hutang dibank, maka banyak petani sawit yang belum mengikuti peremajaan karena takut berkurangnya/hilangnya penghasilan setiap bulannya dan takut tidak bisa membayar hutang yang wajib dibayar setiap bulannya.

Kemudian dari observasi yang penulis lakukan untuk menghadapi masa tunggu peremajaan, setelah menerima dana hibah 25 juta/ha dari BPDPKS, sampai tanaman menghasilkan bersumber dari swadaya pekebun antara lain dari tabungan pekebun atau kredit perbankan.

Dan berdasarkan analisis peneliti selama masa tunggu peremajaan banyak masyarakat petani sawit yang tidak bisa mengurus kredit perbankan, karena banyak petani sawit yang sebelumnya masih memiliki tanggungan hutang dibank, sehingga banyak petani sawit yang belum mengikuti peremajaan karena takut berkurangnya/hilangnya penghasilan setiap bulannya dan tidak bisa membayar hutang yang wajib dibayar setiap bulannya, sehingga banyak petani sawit yang tidak mengikuti peremajaan.

### C. Hambatan Dampak Kebijakan Peremajaan Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Setelah melakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan terkait Dampak Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, antara lain:

1. Masyarakat petani sawit mengalami kehilangan penghasilan utama mereka karena adanya peremajaan sawit, sehingga selama kebun sawit diremajakan banyak masyarakat yang bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari pekerjaan lain atau memanfaatkan tabungan mereka selama kebun sawitnya dulu masih menghasilkan.
2. Masyarakat petani sawit harus memiliki biaya lebih apabila jika masih ada tanggungan anak yang bersekolah ataupun kuliah, sehingga pengeluaran tidak hanya cukup hanya makan saja tetapi juga harus memikirkan biaya kuliah dan lain-lain, banyaknya biaya yang dibutuhkan masyarakat selama masa tunggu peremajaan sehingga banyak masyarakat petani sawit yang lebih memilih mempertahankan kebun sawitnya dan belum melakukan peremajaan
3. Masih kurangnya *monitoring* pemerintah terhadap jalannya kegiatan, sehingga kurang mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Apabila *monitoring* rutin dilakukan dilapangan, maka pemerintah dapat menemukan jalan keluar agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan peremajaan, sehingga pemerintah melalui dinas pertanian dapat melakukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya profesi yang sangat berdampak peremajaan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan ini, penulis membuat kesimpulan:

1. Setelah melakukan penelitian ini diketahui bahwa Kebijakan Peremajaan Sawit Oleh Pemerintah Terhadap Masyarakat Petani Sawit Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak masih ada kendala dan masih belum berjalan maksimal, sehingga perlu dilakukan *monitoring* terhadap jalannya peremajaan dilapangan untuk mengetahui dampak-dampak yang terjadi dilapangan sehingga dapat terciptanya kesejahteraan petani sawit melalui sistem perkebunan yang berkelanjutan di masa yang akan datang, dan kebijakan peremajaan sawit ini sangat berdampak baik/positif kedepannya, karena dengan adanya peremajaan sawit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sawit di masa yang akan datang.
2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan peremajaan sawit mempunyai dampak sementara terhadap masyarakat petani sawit dan dampaknya sebagai berikut:
  - a. masyarakat petani sawit mengalami kehilangan penghasilan utama mereka karena adanya peremajaan sawit, sehingga selama kebun sawit diremajakan banyak masyarakat yang bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari pekerjaan lain atau memanfaatkan tabungan mereka selama kebun sawitnya dulu masih menghasilkan.

- b. Masyarakat petani sawit harus memiliki biaya lebih apabila jika masih ada tanggungan anak yang bersekolah ataupun kuliah, sehingga pengeluaran tidak hanya cukup hanya makan saja tetapi juga harus memikirkan biaya kuliah dan lain-lain, banyaknya biaya yang dibutuhkan masyarakat selama masa tunggu peremajaan sehingga banyak masyarakat petani sawit yang lebih memilih mempertahankan kebun sawitnya dan belum melakukan peremajaan.

## **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian maka disini penulis ingin memberikan saran bagi pemerintah melalui dinas pertanian kabupaten siak yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah dalam bidang Pertanian dalam melakukan kegiatan kebijakan peremajaan sawit, yaitu sebagai masukan bagi pemerintah yang menjalankan kebijakan peremajaan sawit di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

1. Agar terwujudnya kegiatan peremajaan yang baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian kedepannya, maka dalam hal ini sangat diperlukan hubungan yang baik antara pemerintah melalui dinas pertanian kabupaten siak sebagai pelaksana kebijakan peremajaan sawit dengan masyarakat petani sawit yang ada di Kecamatan Koto Gasib, karena keakraban hubungan antara pelaksana dan petani sawit dapat memungkinkan terciptanya sasaran dan dapat mengemukakan masalah-masalah yang ada dilapangan.
2. Memberikan ketegasan dan sikap dorongan kepada masyarakat petani sawit untuk berfikir bahwa pentingnya peremajaan, prinsip ini dimaksudkan bahwa melalui

peremajaan sawit dapat terciptanya kesejahteraan petani sawit melalui sistem perkebunan yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.

3. Pemerintah melalui Dinas Pertanian harus selalu melakukan *monitoring* terhadap jalannya kegiatan peremajaan sawit dilapangan, sehingga dapat mengetahui dampak-dampak yang terjadi dilapangan dan dapat melakukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya profesi yang sangat berdampak peremajaan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Abdillah. W & Hartono.J. 2015 *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Asmadi. (2008). *Teknik Prosedural Keperawatan: Konsep Dan Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien*. Jakarta: Salemba Medika
- Budiardjo, Miriam.2008.*Dasar - Dasar Ilmu Politik*.Jakarta.Gramedia.
- Dunn, William, 2003 *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta. Gadjamada Press
- Effendi, Rustam & Widarnako, Agus . *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka.
- Hasan,Erliana.2005. *Komunikasi Pemerintahan*.Jatinangor. PT Refika Aditama
- Hidayat, A. 2000. Keamanan pangan. Bogor. Badan penelitian boteknologi tanaman pangan
- Moran,Michael dkk. 2006. *Handbook Kebijakan Publik*. Bandung. Nusa Medi
- Ndraha,Taliziduhu,2003,*Kybernology(Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta,Rineka Cipta.
- Ndraha,Taliziduhu,2005,*Kybernology(Ilmu Pemerintahan Baru): Sebuah Rekonsi Ilmu Pemerintahan*". Jakarta,Rineka Cipta.

- Nugroho D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pamuji, 2005. *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Pamungkas, Wisnu dkk. 2013. *Strategi Bertahan Hidup Penjual Makanan Tradisional Serabi Di Pasar Turi, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta*
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta. Pelangi Aksara
- Stuart dan sundeen. 1998. *Buku saku keperawatan jiwa edisi 3 alih bahasa achir yani.s.* jakarta. EGC
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. PT Buku Kita. Jakarta
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- World Health Organization. 1948. *Pengertian Kesehatan*. (online). Di akses dari <http://eksistensikesehatan.blogspot.co.id/Pengertian-kesehatan-secara-umum.html>

## B. Jurnal

Julismin Dan Hidayat, Nasrullah. 2013. *Gambaran Pelayanan Dan Perilaku Kesehatan Di Indonesia*

Saputri, een. 2018. *Kesiapan Petani Kelapa Sawit Dalam Menghadapi Peremajaan Kebun (Replanting) Di Kampung Delima Jaya Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Jom Fisip Vol. 5 No. 1 – April 2018.*

Siringoringo, fitri yan 2018. *Kajian Kemampuan Ekonomi Petani Dalam Pelaksanaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.*

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perkebunan

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/Kb.120/3/2017

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Perkebunan